HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
21 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

SABTU, 7 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 16

NASIONAL

Ijazah Jokowi Diperlihatkan di Sidang, Pakar Komunikasi Politik Sebut Membentuk Persepsi Positif

Oleh Redaksi · 7 Nov, 19.32 WIB



BANDA ACEH- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memperlihatkan dokumen ijazahnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Hal itu menjadi perhatian dalam dinamika komunikasi Politik. Namun, tindakan tersebut belum tentu menghasilkan penilaian yang sama di tengah masyarakat.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai respons masyarakat terhadap penampilan Jokowi di persidangan sangat dipengaruhi oleh sikap dan pandangan politik yang telah terbentuk sebelumnya.

"Bila sikap awal publik terhadap Jokowi positif, maka komunikasi yang dibangun Jokowi selama di persidangan akan dapat mempengaruhi persepsi publik yang juga positif. Sebaliknya, bila sikap awal publik terhadap Jokowi sudah negatif, maka apa pun komunikasi yang dibangun Jokowi di persidangan akan melahirkan persepsi yang juga negatif," ujar Jamiluddin.

Menurutnya, perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik seorang tokoh tidak selalu diterima secara seragam oleh masyarakat.

Jamiluddin menjelaskan, selama persidangan Jokowi memperlihatkan komunikasi verbal dan nonverbal yang relatif terkendali. Mantan presiden tersebut dinilai mampu menjaga intonasi dan pembawaannya ketika menjawab berbagai pertanyaan.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Selamat Ginting: Ada Beberapa Menteri dan Komisaris BUMN akan Ditangkap



BANDA ACEH - Pengamat Politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, mengungkap sejumlah kejanggalan dalam daftar sekitar 6.000 nama yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.Menurut Selamat, daftar tersebut justru tidak memuat sejumlah nama yang selama ini dikenal sebagai bagian dari lingkaran dekat Presiden ke-7 …

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Diisukan Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo, Bahlil: Saya Juga Disadap!



BANDA ACEH - Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam skandal penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, spekulasi itu tidak masuk akal dan merupakan pembodohan publik.

Bahlil mengatakan bahwa dirinya turut menjadi korban dari praktik penyadapan ilegal tersebut.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 11
Aneka Berita 15

ACEH

Bupati Syech Muharram Apresiasi Pengurus PGRI, Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh Besar



KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pengurus Cabang (PC) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang baru dilantik untuk masa bakti 2025–2030.

Menurut Syech Muharram, PGRI memiliki peran penting sebagai wadah perjuangan sekaligus rumah bagi para guru dalam memperjuangkan kepentingan …

Selengkapnya di halaman 11 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Ini Ulah Abuleke



BANDA ACEH -Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah tudingan keterlibatannya dalam dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Bahlil bahkan mengancam akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan pertemuan bersama sejumlah jenderal Polri sebelum mereka ditangkap.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

18 BERITA

NASIONAL

Ijazah Jokowi Diperlihatkan di Sidang, Pakar Komunikasi Politik Sebut Membentuk Persepsi Positif

Oleh Redaksi · 7 Nov, 19.32 WIB



BANDA ACEH- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memperlihatkan dokumen ijazahnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Hal itu menjadi perhatian dalam dinamika komunikasi Politik. Namun, tindakan tersebut belum tentu menghasilkan penilaian yang sama di tengah masyarakat.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai respons masyarakat terhadap penampilan Jokowi di persidangan sangat dipengaruhi oleh sikap dan pandangan politik yang telah terbentuk sebelumnya.

"Bila sikap awal publik terhadap Jokowi positif, maka komunikasi yang dibangun Jokowi selama di persidangan akan dapat mempengaruhi persepsi publik yang juga positif. Sebaliknya, bila sikap awal publik terhadap Jokowi sudah negatif, maka apa pun komunikasi yang dibangun Jokowi di persidangan akan melahirkan persepsi yang juga negatif," ujar Jamiluddin.

Menurutnya, perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik seorang tokoh tidak selalu diterima secara seragam oleh masyarakat.

Jamiluddin menjelaskan, selama persidangan Jokowi memperlihatkan komunikasi verbal dan nonverbal yang relatif terkendali. Mantan presiden tersebut dinilai mampu menjaga intonasi dan pembawaannya ketika menjawab berbagai pertanyaan.

"Penggunaan intonasi dan nada bicara Jokowi cenderung datar, tenang, dan tidak menunjukkan fluktuasi emosi yang tinggi, tidak meledak-ledak ataupun defensif berlebihan," jelasnya.

Selain pembawaan yang tenang, Jamiluddin juga menyoroti tindakan Jokowi yang meminta izin kepada majelis hakim untuk memperlihatkan langsung dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 kepada pengunjung persidangan.

Ia menilai tindakan tersebut menjadi bagian dari komunikasi visual yang dapat membentuk persepsi mengenai kesiapan Jokowi menghadapi proses hukum.

Jamiluddin juga melihat sikap Jokowi yang mengikuti persidangan secara tertib sebagai upaya menampilkan dirinya sebagai warga negara yang menghormati prosedur hukum.

"Jokowi ingin menunjukkan sebagai warga negara kebanyakan yang patuh dan taat aturan. Jokowi tidak menunjukkan layaknya mantan presiden," katanya.

Meski demikian, Jamiluddin menilai penampilan tersebut juga dapat dibaca sebagai strategi komunikasi untuk membangun citra. Dampaknya tetap bergantung pada cara masyarakat memaknai tindakan Jokowi.

Sementara itu, akademisi Universitas Airlangga (Unair), Dr. Suko Widodo, menilai polemik ijazah Jokowi tidak lagi sebatas persoalan administratif, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kepercayaan politik.

"Polemik ini telah bergeser dari persoalan administratif menjadi persoalan kepercayaan politik," ujar Suko.

Menurutnya, teori framing menjelaskan bagaimana fakta yang sama dapat memperoleh penafsiran berbeda sesuai pandangan politik masing-masing kelompok.

NASIONAL

PAN Minta Gibran Mundur dari Wapres usai Fotonya Dicopot di Gedung DPRD DIY

Oleh Redaksi · 6 Nov, 20.20 WIB

BANDA ACEH - Aksi pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuai sorotan luas. Peristiwa tersebut berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Rabu (4/11/2026).

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding menilai aksi pencopotan itu bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat.

"Itu bentuk ekspresi atas kekecewaan masyarakat terhadap eksistensi, ya. Wakil Presiden kita yang sudah tidak mempunyai legitimasi lagi, tidak memiliki lagi legitimasi moral sebagai Wakil Presiden," kata Sudding kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Sudding mengimbau Gibran mundur dari Wapres setelah tidak mendapatkan legitimasi lagi dari masyarakat.

"Ketika dia sudah tidak mendapatkan legitimasi moral dari masyarakat seperti itu, sebagai Wakil Presiden dia harus mundur dalam jabatannya," ujar Sudding.

Menurut Sudding, DPR juga bisa memakai hak menyatakan pendapat jika Gibran tak kunjung mundur. Hak menyatakan pendapat itu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Mahkamah Agung (MA).

"DPR punya kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden, Saudara Gibran Rakabuming Raka," kata Sudding.

Sebelumnya diberitakan, aksi nekat sekelompok aktivis dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kebangsaan DIY mencopot foto Wapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Aksi pencopotan foto terjadi saat gelaran audiensi antara Forum Kebangsaan DIY dengan jajaran pimpinan DPRD DIY.

Massa aksi tersebut dihadiri sejumlah tokoh lokal, seperti mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadholi selaku Pelindung Forum, serta Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin.

Video tersebut memperlihatkan momen ketika massa secara spontan menurunkan bingkai foto resmi orang nomor dua di Indonesia itu tak lama setelah memasuki ruang sidang. Foto Wapres baru dikembalikan dan dipasang lagi ke dinding ruangan sesudah audiensi tuntas diselenggarakan.

Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menegaskan aksi mencopot foto Gibran dari dinding gedung dewan disengaja sebagai bentuk protes keras sekaligus simbol pesan Politik.

"Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati. Andai kata DPR RI tidak menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," kata Chirzin kepada awak media

NASIONAL

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Ini Ulah Abuleke

Oleh Redaksi · 7 Nov, 19.19 WIB



BANDA ACEH -Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah tudingan keterlibatannya dalam dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Bahlil bahkan mengancam akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan pertemuan bersama sejumlah jenderal Polri sebelum mereka ditangkap.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam sambutannya pada acara pelantikan DPD Partai Golkar Maluku, dikutip Sabtu, 7 November 2026.

Bahlil mengaku justru menjadi salah satu korban penyadapan. Karena itu, ia mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan.

"Kita Partai Golkar mendukung secara penuh aparat penegak hukum dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan penyadapan," tegasnya.

Bahlil kemudian menyoroti informasi yang menyebut adanya pertemuan antara ketua umum partai Politik dengan sejumlah jenderal, tiga jam sebelum para perwira tersebut ditangkap.

Ia mengaku terkejut karena informasi yang awalnya tidak terlalu diperhatikannya itu belakangan justru mengarah kepada dirinya.

"Saya mau sampaikan di dalam mimbar ini karena menuduh ketum partai, saya sengaja bicara di forum ini, segera klarifikasi itu," tegasnya.

Bahlil justru meminta kepolisian mengusut dan membuka secara transparan informasi mengenai dugaan pertemuan tersebut. Ia juga menantang pihak yang menuding dirinya untuk membuktikan tuduhan itu.

"Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan, kalau tidak saya akan somasi. Kalau tidak saya akan proses secara hukum. Karena ini berbahaya. Tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menilai tuduhan tanpa bukti dapat merusak reputasi seseorang maupun institusi partai politik.

Ia pun memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut untuk memberikan klarifikasi. Jika tidak, dirinya akan menempuh jalur hukum.

"Saya akan kasih waktu ya, 3X24 jam lah. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita kan negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum," tegasnya.

Bahlil menegaskan tidak akan mundur menghadapi pihak-pihak yang berupaya menyeret Golkar dalam polemik penyadapan ilegal. Ia bahkan menyindir pihak yang membangun tudingan tersebut dengan sebutan 'Abuleke'.

Abuleke adalah kata berasal dari bahasa Maluku (terutama Ambon dan sekitarnya), yang artinya munafik atau bermuka dua, atau suka berbohong.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Panglima TNI Angkat Bicara Soal Dugaan Seskab Teddy Diperiksa POM TNI

Oleh Redaksi · 6 Nov, 22.45 WIB

BANDA ACEH - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menanggapi isu dugaan pemeriksaan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang dikabarkan sedang menjalani pemeriksaan di Polisi Militer (POM) TNI.Agus menyatakan isu pemeriksaan Teddy di POM TNI merupakan berita yang tidak benar.

“Hoaks,” kata Agus singkat saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, Jumat (6/11/2026).

Diberitakan sebelumnya, nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya ikut menjadi sorotan di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Perkara intersepsi komunikasi kepala negara ini sebelumnya telah menyeret mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Selamat Ginting: Ada Beberapa Menteri dan Komisaris BUMN akan Ditangkap

Oleh Redaksi · 7 Nov, 15.16 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, mengungkap sejumlah kejanggalan dalam daftar sekitar 6.000 nama yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.Menurut Selamat, daftar tersebut justru tidak memuat sejumlah nama yang selama ini dikenal sebagai bagian dari lingkaran dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, Pratikno, dan sejumlah tokoh lainnya.

“Yang dikemukakan dari enam ribuan daftar nama itu tidak ada KGB, Kaesang, Gibran, Bobby. Tidak ada orang-orang lingkaran dekat dari Presiden Jokowi, Pratikno, kemudian yang lainnya, tidak ada,” kata Selamat Ginting, Sabtu (7/11/2026).

Sebaliknya, ia menyoroti munculnya nama-nama orang yang selama ini dikenal berseberangan atau kritis terhadap Jokowi.

“Yang ada adalah kita-kita yang suka hadir di sini. Ada tuh yang kontra dengan Jokowi misalnya. Itu ada apa? Kemudian Wapres Gibran juga tidak ada,” ujarnya.

Selamat menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat hanya sebagai perkara hukum biasa. Menurut dia, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan nasional dan berpotensi menjadi perhatian internasional.

“Oleh karena itu kita harus melihatnya, ini bukan soal hukum semata, tetapi ini adalah kasus kejahatan luar biasa. Dunia juga melihat ini. Ini bukan isu nasional lagi, tetapi isu internasional,” tegasnya.

Selamat bahkan mengaku telah memperkirakan adanya sekitar 14 perwira tinggi yang berpotensi terseret dalam perkara tersebut.

Ia menduga sejumlah perwira tinggi itu bisa menjadi tersangka apabila penyelidikan menemukan bukti keterlibatan mereka.

“Saya sampai menghitung ketika tanggal 1, ini ada sekitar 14 perwira tinggi yang akan terseret, yang saya duga akan menjadi tersangka,” ungkapnya.

Untuk menggambarkan besarnya kemungkinan dampak Politik dan keamanan dari perkara tersebut, Selamat membandingkannya dengan peristiwa penangkapan sejumlah menteri pada era Presiden Soekarno setelah Gerakan 30 September 1965.

Ia mengingatkan bahwa perkembangan perkara ini bisa membawa konsekuensi politik yang luas, terutama apabila dugaan keterlibatan pejabat tinggi negara dan aparat keamanan terbukti.

Dalam perbincangan tersebut, Selamat juga ditanya mengenai dugaan arah keterlibatan Jokowi dalam perkara penyadapan terhadap Prabowo.

Menanggapi pertanyaan itu, Selamat membenarkan bahwa dirinya melihat adanya indikasi yang mengarah kepada mantan Presiden Jokowi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Satgas PKH Usut Jaringan Tambang Nikel Arif Kurniawan yang Diduga Dibekingi Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 6 Nov, 22.53 WIB

BANDA ACEH – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) secara resmi menargetkan jaringan perusahaan tambang nikel yang terafiliasi dengan pengusaha berinisial AK, yang dikenal sebagai “Raja Nikel”. Langkah ini dilakukan setelah indikasi kuat penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan keputusan tersebut usai rapat pimpinan yang digelar pada Rabu malam, 4 November 2026, di Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung. Rapat dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

“Pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK,” ujar Barita.

Satgas PKH telah menyelesaikan tahap penelaahan dan verifikasi awal. Hasilnya menunjukkan adanya indikasi pelanggaran dalam tata kelola perizinan pertambangan serta pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin sah. Tim juga sedang mengidentifikasi seluruh korporasi yang memiliki hubungan hukum dengan AK dan mendalami dugaan keterkaitan dengan oknum aparat penegak hukum.

Berdasarkan konfirmasi Barita Simanjuntak dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, inisial AK merujuk pada Arif Kurniawan. Pengusaha yang sebelumnya relatif tertutup ini belakangan dikenal luas setelah laporan investigasi Bloomberg pada akhir Desember 2025 menyebutnya sebagai salah satu pengendali perdagangan bijih nikel domestik terbesar di Indonesia melalui jaringan PT Dua Delapan Resources (28 Resources) dan mitranya.

Menurut laporan tersebut, jaringan bisnis Arif diperkirakan menguasai sekitar sepertiga perdagangan bijih nikel domestik, dengan kepentingan di lebih dari 20 konsesi yang luasnya mencapai lebih dari 71.000 hektare, tersebar di sejumlah sentra nikel, termasuk Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.

Sejumlah media melaporkan bahwa Arif Kurniawan diduga mendapat perlindungan (bekingan) dari mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Dugaan ini mengemuka di tengah status Listyo yang baru ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Satgas PKH sendiri belum secara resmi menyebut nama Listyo Sigit. Namun, Barita Simanjuntak menegaskan bahwa pihaknya sedang mendalami seluruh hubungan hukum korporasi terkait AK, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat, setelah pertanyaan wartawan soal kemungkinan bekingan jenderal polisi bintang empat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Diisukan Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo, Bahlil: Saya Juga Disadap!

Oleh Redaksi · 7 Nov, 13.00 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam skandal penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, spekulasi itu tidak masuk akal dan merupakan pembodohan publik.

Bahlil mengatakan bahwa dirinya turut menjadi korban dari praktik penyadapan ilegal tersebut.

"Jadi, ini mereka membangun persepsi seolah-olah kita ada urusannya dengan penyadapan. Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan sementara saya juga disadap," kata Bahlil dalam pidato di acara partai, Sabtu (7/11/2026).

Dia pun menyindir penyebar hoaks tersebut dengan istilah bahasa lokal Timur "abu leke" yang berarti omong kosong.

"Abu leke ini, asli abu leke. Ini asli ilmu abu leke ini. Ya, ini abu leke ini. Kreatif dikit gitu loh, kreatif dikit," kata dia.

Di balik tudingan itu, pria yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu turut mencium adanya upaya pihak luar yang gerah melihat elektabilitas partainya yang kini melesat ke posisi dua digit usai pemilu.

"Hati-hati kita Partai Golkar. Kita Partai Golkar ini sekarang lagi pada on the track-nya bagus. Konsolidasi kita bagus. Hasil survei sekarang biasanya pemilu baru selesai 2 tahun di 7-8 persen, sekarang double digit, di angka 10,5 sampai dengan 13 persen. Mereka sedang menguji kekompakan kita," ucapnya.

Dia kemudian meminta jajaran kepolisian untuk membongkar tuntas pihak-pihak di balik isu rapat siluman para jenderal agar fitnah yang beredar di ranah maya tidak terus bergulir di ruang publik.

"Saya meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya kepada Polri, ini untuk mengusut tuntas. Kalau memang ada rapat itu siapa aja, dibuka aja! Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu," tuturnya.

Sebagai informasi, penyelidikan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merebak setelah terungkapnya penyalahgunaan perangkat LIMS di tubuh Korps Bhayangkara pada periode 2025–2026.

Bareskrim Polri telah menahan Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama perwira tinggi lainnya atas dugaan pelanggaran etik dan tindak pidana siber.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi yang ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ulah Listyo Sigit Dkk Menjurus Makar, Program Kerakyatan Presiden Terganggu

Oleh Redaksi · 6 Nov, 18.52 WIB

BANDA ACEH -Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya sudah menjurus pada tindakan makar.

Hal itu disampaikan Pemrakarsa 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo, yang menganggap tindakan Listyo Sigit dkk telah berupaya melumpuhkan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.

"Pelanggaran itu sudah dilakukan sejak 2025, ini patut kita duga sebagai upaya sistematis dan terencana untuk menyabotase serta melumpuhkan kemampuan kepala negara," ucap Wignyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

Menurut dia, Polri harus objektif dan transparan dalam membongkar kasus ini.

"Kita apresiasi apa yang dilakukan Polri dan kita berharap Polri dapat membongkar kasus ini sehingga segalanya menjadi terang benderang," ungkapnya.

Mantan aktivis 98 ini juga berharap penyelidikan Polri tidak berhenti di internal kepolisian semata dan perlu menelusuri pihak-pihak lain yang turut menggunakan penyadapan tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Viral Rekaman Audio Sebut Prabowo Disajikan Es Buah Mengandung Arsenik Sebelum Dilantik

Oleh Redaksi · 7 Nov, 14.09 WIB



Momen keakraban saat Prabowo Subianto menikmati hidangan penutup di sebuah acara resmi.

BANDA ACEH - Sebuah rekaman audio yang diunggah akun X @yaniarsim (7 November 2026) tengah beredar luas dan memicu perbincangan.

Dalam audio tersebut, seorang narator menceritakan kejadian yang diklaim terjadi setelah Pemilu 2024, ketika Prabowo Subianto sudah menjadi presiden terpilih namun belum dilantik (pelantikan 20 Oktober 2024).

Menurut narator, Prabowo menghadiri buka puasa bersama di sebuah partai (nama partai tidak disebutkan).

Seorang teman dekat narator sejak kecil menjadi ketua panitia acara tersebut.

Sebagai presiden terpilih, Prabowo sudah dikawal Paspampres, namun masih Paspampres era presiden sebelumnya.

Narator mengisahkan soal makanan yang disajikan, khususnya es buah.

Tim pengawal menguji makanan tersebut dan menyatakan aman, lalu makanan diisolasi.

Namun, tim Prabowo mengirimkan pemeriksaan ulang. Hasilnya diklaim reaktif arsenik, sehingga makanan tersebut disingkirkan.

https://www.twitter.com/yaniarsim/status/2118868344824848579/

Unggahan ini langsung dikaitkan banyak warganet dengan pernyataan lama Connie Rahakundini Bakrie pada awal 2024.

Pada Februari 2024, Connie sempat viral karena mengklaim mendapat informasi dari Rosan Roeslani (saat itu Ketua TKN Prabowo-Gibran) bahwa Prabowo hanya akan menjabat dua tahun, lalu digantikan Gibran.

Rosan membantah keras dan justru menyatakan bahwa Connie sendiri yang mengucapkan kemungkinan Prabowo diracun.

Menurut Rosan, Connie mengatakan kira-kira: “Ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau kalau tiba-tiba Pak Prabowo, saya ini orang intelijen, bisa saja Pak Prabowo diracun, bisa lebih cepat, itu gimana?”

Rosan menilai pernyataan tersebut tidak pantas dan melaporkan Connie ke Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik.

Prabowo sendiri saat itu mendukung langkah Rosan.

Connie juga pernah mengaitkan isu serupa dengan informasi yang didengar Hasto Kristiyanto soal Prabowo hanya menjabat tiga tahun.

Kini, di tengah kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri (Istana menyebut indikasi makar), rekaman audio ini kembali memunculkan narasi lama soal ancaman terhadap Prabowo.

Mahfud MD dan sejumlah pihak juga sempat mengungkit pernyataan Connie terkait skenario masa jabatan singkat Prabowo.

Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari Istana, pihak Prabowo, atau Paspampres mengenai kejadian yang diceritakan dalam audio tersebut.

Protokol Paspampres memang diketahui melakukan pengujian makanan untuk VVIP terhadap zat berbahaya seperti sianida, arsenik, dan formalin.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dituding Rapat dengan Jenderal Terkait Penyadapan, Bahlil Ancam Layangkan Somasi: Jangan Fitnah!

Oleh Redaksi · 7 Nov, 13.05 WIB



BANDA ACEH - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bereaksi keras setelah namanya dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Dia membantah tudingan sempat menggelar pertemuan rahasia dengan sejumlah jenderal polisi sebelum penangkapan terkait skandal tersebut.

Bahlil bahkan mengancam akan melayangkan somasi kepada pihak yang menyebarkan tudingan tersebut. Dia menegaskan tidak akan tinggal diam jika namanya terus diseret dalam isu yang dinilai berbahaya dan mencemarkan nama baik.

Bahlil mengaku baru mengetahui namanya dikaitkan dengan kasus tersebut setelah mendarat dari penerbangan pagi. Dia dituding sebagai ketua umum partai yang bertemu sejumlah perwira tinggi polisi tiga jam sebelum mereka diamankan.

"Tiba-tiba ada suatu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa 3 jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka," ujar Bahlil dalam pidatonya, Sabtu (7/11/2026).

Dia kemudian menyoroti pernyataan seorang tokoh senior yang menyampaikan tudingan tersebut melalui podcast di media sosial. Bahlil meminta pihak yang menuduhnya menunjukkan bukti.

"Dan saya memberikan kepada tadi itu ada senior saya juga, senior saya yang merasa paling pintar bicara, ya sering pakai kacamata orangnya, di podcast. Ya saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya," katanya.

Bahlil memastikan akan mengambil langkah hukum jika tudingan tersebut tidak disertai bukti. Dia bahkan memberikan tenggat waktu kepada pihak yang dianggap menyebarkan fitnah sebelum membawa perkara tersebut ke jalur hukum.

"Dan saya kasih waktu, saya akan habis ini pulang saya akan somasi orang-orang itu. Saya akan kasih waktu ya 3 kali 24 jam lah. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita kan negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum," katanya.

Menurut Bahlil, tudingan tersebut bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi juga menyangkut kehormatan partai dan jabatan ketua umum yang diembannya. Dia menegaskan tidak akan mundur menghadapi pihak yang menyampaikan tuduhan tanpa dasar.

"Karena bicara partai, itu marwah partai. Ketua umum partai, itu marwah. Jadi saya tidak mau mundur dari orang-orang kayak gini. Enggak bisa. Masa atas nama sebuah demokrasi ngomongnya ngawur?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kepala BIN: Penyadapan Listyo Sigit Cs terhadap Prabowo Mengarah Makar

Oleh Redaksi · 6 Nov, 20.28 WIB

BANDA ACEH - Pernyataan mengejutkan dilontarkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Herindra secara tegas menyebut tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sudah mengarah pada dugaan makar.

Pernyataan keras itu disampaikan Herindra saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

“Saya pikir itu adalah suatu tindakan ilegal dan mengarah ke tindakan makar. Itu saja,” tegas Herindra.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan lantaran dugaan penyadapan itu menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Kasus ini pun berpotensi menjadi persoalan serius karena menyangkut keamanan dan kewibawaan kepala negara.

Meski memberikan penilaian tegas, Herindra memilih irit bicara ketika awak media menggali lebih jauh mengenai dugaan keterlibatan Listyo Sigit dan sejumlah pihak lainnya, termasuk isu yang mengaitkan perkara tersebut dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Herindra tidak memberikan penjelasan tambahan. Ia hanya berlalu meninggalkan awak media menuju Kompleks Istana Kepresidenan.

Kedatangan Herindra ke Istana, menurut pengakuannya, bertujuan menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo.

Namun, ketika ditanya mengenai materi laporan tersebut, Kepala BIN itu kembali menutup rapat informasi dan enggan mengungkapkan detailnya.

Di sisi lain, perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto telah memasuki babak serius setelah Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.

Tidak hanya Listyo Sigit, penyidik juga menetapkan tiga nama lainnya sebagai tersangka, yakni Kadivkum Polri …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dirut KAI Bobby Rasyidin Buka Suara soal KPK Sita Rp2 Miliar: Saya Sangat Sedih

Oleh Redaksi · 6 Nov, 20.16 WIB

BANDA ACEH - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin buka suara soal penyitaan uang Rp2 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyitaan itu disebut-sebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018-2023.

Bobby mengaku sedih melihat banyaknya pemberitaan seolah penyitaan tersebut dilakukan baru-baru ini.

"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," kata Bobby dalam keterangan tertulisnya, Jumat …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Hot! Beredar Kabar Mantan Kapolri yang Menjabat di Pemerintahan Terlibat Penyadapan

Oleh Redaksi · 6 Nov, 18.32 WIB

BANDA ACEH - Aktivis media sosial Buni Yani mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan menyusul beredarnya kabar dugaan keterlibatan mantan Kapolri yang kini menduduki jabatan di pemerintahan dalam kasus penyadapan.Buni Yani menilai, kabar tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menunjukkan adanya persoalan di dalam lingkaran pemerintahan. Ia mengingatkan agar dugaan tersebut tidak dibiarkan tanpa penjelasan dan penyelidikan menyeluruh.

“Beredar kabar mantan Kapolri yang sekarang mendapatkan jabatan di pemerintahan juga ikut terlibat dalam penyadapan. Pak @Prabowo harus cepat bertindak,” kata Buni Yani di akun X, Jumat (6/11/2026).

Menurut dia, dugaan keterlibatan pejabat yang pernah memimpin institusi kepolisian dalam kasus penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aksi Rakyat Bela Indonesia Digelar di Jaksel Besok, Tuntut Proses Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 7 Nov, 15.23 WIB



BANDA ACEH - Massa Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) akan menggelar aksi di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026). Aksi yang diperkirakan diikuti ribuan orang itu membawa sejumlah tuntutan, termasuk mendesak pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Organizing Committee (OC) ARBI, Bachtiar Nasir mengatakan, rangkaian aksi akan dimulai dengan salat subuh berjemaah di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 hingga 10.00 WIB di Lapangan Hijau Al-Azhar.

"Besok mulai dari jam ya salat subuh, puncak acaranya nanti jam 08.00 sampai jam 10.00," kata Bachtiar dalam konferensi pers di Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2026).

Bachtiar berharap aksi tersebut diikuti ribuan orang. Dia menyebut gerakan ini terbuka bagi seluruh elemen masyarakat, tidak terbatas pada organisasi masyarakat (ormas) Islam.

"Ya mudah-mudahan sih ribuan angkanya, ya. Angkanya ribuan," ujarnya.

Salah satu tuntutan yang diangkat yakni pelaksanaan putusan MK dan MA secara konsisten. Bachtiar menilai persoalan tersebut harus segera dituntaskan pemerintah karena berkaitan dengan persoalan hukum dan moral.

"MK dan MA ini kan lembaga negara yang sudah memutuskan secara tegas dalam hal ini bahwa ini bukan cuma cacat secara hukum dan moral, sudah mungkin istilah undang-undang dasar sudah tercela. Dan kalau ini tidak diputuskan oleh pemerintah sekarang, tidak dijalankan oleh pemerintahan Prabowo, ini akan menjadi panjang persoalannya, karena ini sakral masalah hukum ini. Sehingga ini harus segera dituntaskan," katanya.

Ketika ditanya apakah tuntutan tersebut mengarah pada pemakzulan Gibran, Bachtiar tidak menutup kemungkinan tersebut.

"Boleh jadi arahnya seperti tuntutan sebagian masyarakat ya, dimakzulkan," ujarnya.

Selain persoalan putusan MK dan MA, Bachtiar menyinggung kasus penyadapan yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap sejumlah tokoh. Dia menyebut penyadapan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan, terlebih jika diarahkan untuk menggulingkan pemerintahan.

"Yang kedua, tegas kami katakan bahwa pengkhianatan ketika penyadapan. Bagi saya ini adalah pengkhianatan. Terutama bukan cuma presiden urusannya ini, rupanya kami pun kena gitu," katanya

NASIONAL

Bahlil Ngaku Ikut Disadap 'Dewan Jenderal', Takut Isi Telepon Malam Ketahuan

Oleh Redaksi · 7 Nov, 19.25 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya juga menjadi korban dugaan penyadapan ilegal. Nomor telepon pribadinya disebut ikut disadap sejumlah jenderal Polri atau 'Dewan Jenderal' seperti yang dialami Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengaku merasa tidak nyaman setelah mengetahui dugaan penyadapan tersebut. Dia khawatir komunikasi dan aktivitas pribadinya turut diketahui pihak lain.

"Kepala negara disadap. Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap soalnya. Awak pun jadi disadap. Resah, takut juga itu barang disadap," ujar Bahlil di acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026).

Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi itu kemudian berkelakar soal percakapan teleponnya yang berpotensi diketahui orang lain. Dia mengaku lebih khawatir jika percakapan yang dilakukan pada malam hari ikut terungkap.

"Karena telepon saya itu kan kelakuan siang dan malam kan ketahuan semua di situ, kan gitu. Yang saya takut itu bukan ditelepon siangnya, malamnya itu saya takut gitu," kata dia.

Namun, di balik candaan tersebut, Bahlil menegaskan penyadapan ilegal merupakan persoalan serius. Dia menilai tindakan itu berpotensi menimbulkan dampak luas dan mengancam kepentingan negara.

"Wah, saya bilang ini bisa berdampak sistemik, masif, dan terstruktur ini, saya bilang," ucapnya.

Bahlil pun menyatakan Partai Golkar mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Dia meminta proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan transparan.

"Kita, Partai Golkar, mendukung secara penuh aparat penegak hukum dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan penyadapan. Kita mendukung penuh. Diusut tuntas, dan dilakukan secara transparan," katanya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi

NASIONAL

Cegah Kasus Penyadapan Presiden Terulang, DPR Kebut RUU Penyadapan, Begini Isinya

Oleh Van · 6 Nov, 19.34 WIB

JAKARTA — DPR RI mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan segera dilanjutkan setelah kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh mencuat.

Dorongan tersebut disampaikan sejumlah anggota DPR pada Kamis, 5 November 2026, dan Jumat, 6 November 2026. Regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan.

Selama ini, aturan penyadapan tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral sehingga diperlukan satu payung hukum yang mengatur kewenangan, prosedur, dan pengawasannya.

Kasus Penyadapan Ilegal Jadi Alarm Perlindungan Privasi

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menilai pembentukan regulasi khusus penyadapan perlu segera dilakukan agar penggunaan teknologi pengawasan tidak merugikan masyarakat.

"Memang harus dibentuk satu regulasi yang mengatur tentang penyadapan. Nah, ini harus disegerakan ya, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas monitoring, surveillance, dan seterusnya itu, bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia," ujar Yanuar dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Kamis, 5 November 2026.

Menurutnya, aturan tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan alat sadap oleh lembaga berwenang dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Yanuar juga menyoroti penggunaan anggaran negara untuk pengadaan perangkat penyadapan. Karena itu, mekanisme pengawasan dan audit dinilai perlu menjadi bagian penting dalam regulasi.

RUU Penyadapan Akan Atur Batas Kewenangan Aparat

Wacana pembentukan RUU Penyadapan sebenarnya telah dibahas sebelum kasus dugaan penyadapan ilegal mencuat. Pada Juli 2026, Badan Legislasi DPR menyebut aturan yang tersebar di berbagai undang-undang perlu disatukan dalam satu payung hukum.

Salah satu persoalan krusial yang perlu diputuskan adalah mekanisme pemberian izin penyadapan. Pembahasan mencakup pilihan apakah izin harus melalui penetapan pengadilan atau cukup menggunakan mekanisme internal lembaga penegak hukum.

Anggota Baleg DPR RI Andi Yuliani Paris sebelumnya mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengatur kewenangan tersebut.

"Penyadapan ini harus hati-hati, sebaiknya masyarakat yang benar-benar boleh disadap apabila sudah ada penetapan tersangka, apabila hanya mencari bukti sebaiknya tidak boleh dilakukan penyadapan," ujarnya dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Kamis, 2 April 2026.

Selain mekanisme perizinan, pembahasan juga perlu memperjelas batas jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar penyadapan serta lembaga yang berwenang melakukannya.

Presiden Minta Kasus Dugaan Penyadapan Diusut Transparan

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Irjen Ahrie Sonta Siap Buka-bukaan di Kasus Penyadapan Presiden

Oleh Redaksi · 7 Nov, 08.11 WIB



BANDA ACEH -Salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Irjen Ahrie Sonta bakal bersikap kooperatif selama menjalani proses hukum.

Hal ini dipastikan oleh pengacara Ahrie, Krisna Murti, yang menyatakan bahwa kliennya akan bersikap terbuka agar perkara yang juga menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit tersebut secara terang benderang.

"Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini," ujar Krisna dalam keterangan video yang diterima redaksi di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026.

Krisna pun percaya, penegakan hukum yang dilakukan Polri berjalan secara profesional.

"Kami meyakini penegakan hukum akan berjalan profesional dan tidak mengabaikan hak-hak klien kami," jelas Krisna

Selain Ahrie dan Sigit, anggota Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan.

Empat tersangka tersebut diduga terlibat dalam penyadapan ilegal pada periode 2025-2026.

NASIONAL

Ahmad Doli Kurnia Buka Suara Perihal Flyer Munaslub Golkar: Saya Tidak Ada Kaitannya!

Oleh Redaksi · 7 Nov, 10.34 WIB



BANDA ACEH -Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung buka suara perihal beredarnya flyer atau poster di media sosial (medsos) bahwa Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pergantian Ketua Umum dari Bahlil Lahadalia ke Ahmad Doli Kurnia.

Dalam flyer itu tertulis seruan "Sukseskan Munaslub Partai Golkar", "Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo", "Caketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung-Tokoh Sentral Partai Golkar". Adapun, Munaslub akan digelar di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pada Minggu 29, November 2026.

"Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu menahu soal penyebaran isu tersebut," tegas Doli kepada RMOL, Sabtu, 7 November 2026.

Doli menegaskan, dirinya selalu mengedepankan pendekatan konstitusional dan institusional dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, maupun bernegara.

Dia mengingatkan bahwa seluruh mekanisme organisasi telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi yang wajib dipatuhi seluruh kader.

"Begitu juga secara institusional, saya sangat mengerti struktur dan hierarki kewenangan serta tanggung jawab dalam berorganisasi dan ber-partai," ujarnya.

Atas dasar itu, Doli memastikan hubungannya dengan Bahlil selama ini berjalan baik, harmonis, dan saling menghormati, terutama dalam pengelolaan partai.

"Saya dan Saudara Bahlil sudah berkoordinasi dan menyadari secara bersama bahwa dalam situasi dan dinamika yang sedang kita hadapi, sebagai sebuah bangsa, pasti ada saja pihak-pihak yang berupaya memperkeruh suasana dan mencoba mencari keuntungan Politik," tegas Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.

Doli bahkan mengaku telah mendeteksi pihak-pihak yang disebutnya sebagai "komprador" dan diduga berasal dari internal Partai Golkar sendiri.

"Dan saya mau sampaikan kepada kalian, jangan ganggu Golkar dengan agenda-agenda kerdil kalian," tegasnya.

Lebih lanjut, Doli mengatakan Partai Golkar saat ini tengah berkomitmen menjaga dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Menurutnya, negara sedang menghadapi ancaman nyata, termasuk dugaan upaya makar terhadap Presiden. Karena itu, Golkar harus berada di barisan depan untuk menjaga dan mengawal Presiden sebagai bentuk komitmen konstitusional terhadap negara.

"Dan saya sebagai kader Golkar akan berada di garda depan untuk itu.

#JagaPresiden #JagaNegara #JagaRakyat #LawanMakar," pungkasnya.

NASIONAL

Soal Polemik Ijazah Jokowi, Akademisi Unair Ingatkan Kepercayaan Politik Ada di Warga

Oleh Redaksi · 7 Nov, 15.18 WIB



BANDA ACEH -Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, terutama menyangkut kepercayaan Politik.

Pesan itu disampaikan oleh Akademisi Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo terkait kehadiran Jokowi dalam persidangan sebagai saksi dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026.

"Polemik ini telah bergeser dari persoalan administratif menjadi persoalan kepercayaan politik," kata Suko dalam keterangannya, Sabtu, 7 November 2026.

Kepercayaan politik publik terhadap Jokowi juga bisa dipengaruhi dari rekam jejak kepemimpinan dalam membentuk reputasi seorang tokoh.

Maka dari itu, publik diajak melihat secara objektif hasil-hasil kerja selama 10 tahun belakang saat Jokowi memimpin Indonesia.

"Rekam jejak dapat menopang reputasi, tetapi tidak menggantikan kewajiban memberikan klarifikasi yang kredibel," tegasnya.

Itu sebabnya, Suko menilai penyikapan terhadap polemik ijazah Jokowi pun perlu pendekatan komunikasi yang mengutamakan keterbukaan informasi dan konsistensi penjelasan.

"Respons perlu mengutamakan keterbukaan yang proporsional, konsistensi informasi, dan penghormatan terhadap proses hukum," ujarnya.

NASIONAL

Istana Lakukan Bersih-bersih Internal Buntut Kasus Penyadapan Presiden, Siapa Bakal Kena?

Oleh Redaksi · 6 Nov, 18.06 WIB



BANDA ACEH - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Istana Kepresidenan akan terus meningkatkan kewaspadaan menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia bahkan memastikan proses bersih-bersih di lingkungan Istana akan terus dilakukan.Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

"Kalau kewaspadaan kan terus-menerus, ya. Kewaspadaan terus-menerus. Bersih-bersih terus," kata Prasetyo.

Selain meningkatkan pengamanan, Prasetyo meminta kasus penyadapan yang menyeret sejumlah jenderal Polri itu diusut secara terbuka. Dia menegaskan tidak boleh ada informasi yang sengaja disembunyikan dalam proses penyelidikan.

"Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan. Dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.

Kasus ini mencuat setelah Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa praktik penyadapan tanpa prosedur tersebut diduga menyasar sejumlah kalangan, mulai dari Presiden Prabowo hingga pejabat negara dan tokoh Politik.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal taping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Asep dalam …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Duit Rp2 M dari Dirut KAI Bobby Diduga Mengalir dari Tersangka Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

Oleh Redaksi · 6 Nov, 20.25 WIB

BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin dalam penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina periode 2018–2023.

KPK menegaskan, penyitaan tersebut berkaitan dengan perkara yang terjadi sebelum Bobby menjabat sebagai Dirut PT KAI.

Uang yang disita itu diduga berasal dari salah satu tersangka dalam perkara pengadaan perangkat electronic data capture (EDC) dan automatic tank gauge (ATG) di SPBU. Penyitaan dilakukan untuk menelusuri aliran dana dalam proyek digitalisasi SPBU yang tengah dibongkar KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan penyitaan terhadap Bobby tidak berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pimpinan perusahaan transportasi pelat merah tersebut. Perkara yang diusut terjadi pada 2018–2023, sedangkan surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan pada 2024.

"Jadi kami sekaligus meluruskan beberapa informasi yang beredar di media bahwa penyitaan terhadap Saudara BR ini bukan kapasitas yang bersangkutan sebagai Dirut PT KAI karena memang tempus perkaranya sudah lama, 2018 sampai 2023 dengan sprindik tahun 2024," kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Budi mengungkapkan, penyidik telah menyita uang milik Bobby sejak Agustus 2025. Penyerahan uang tersebut dilakukan secara kooperatif setelah Bobby mengetahui adanya dugaan keterkaitan dana dengan perkara korupsi digitalisasi SPBU.

KPK menyebut penyitaan tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran aliran dana pengadaan EDC dan ATG yang digunakan untuk mendukung digitalisasi SPBU.

"Sehingga artinya, uang yang disita dari Saudara BR ini membantu dalam proses pengungkapan perkara berkaitan dengan pengadaan digitalisasi SPBU, yang secara umum berkaitan dengan pengadaan EDC ataupun mesin ATG," ujar Budi.

KPK juga mengungkap dugaan sumber uang yang disita dari Bobby. Dana tersebut diduga diberikan oleh salah satu tersangka yang terlibat dalam pelaksanaan proyek digitalisasi SPBU. Namun, Budi menegaskan Bobby bukan pihak yang bertindak sebagai penyedia barang maupun jasa dalam proyek tersebut.

"Ini diduga diberikan oleh salah satu tersangka dalam perkara ini yang kemudian mengerjakan proyek di digitalisasi SPBU. Sedangkan Saudara BR ini tidak atau bukan menjadi penyedia barang dan jasa dalam perkara ini," tutur Budi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang sekitar Rp2 miliar yang disita KPK diduga bersumber dari Elvizar, pemilik PT Pasifik Cipta Solusi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi hingga Gibran Hadiri Resepsi Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran

Oleh Redaksi · 7 Nov, 10.37 WIB



BANDA ACEH -Resepsi pernikahan agung atau Dhaup Ageng Pura Mangkunegaran, yakni prosesi pernikahan adat agung di lingkungan keluarga besar Mangkunegaran, berlangsung di Solo, Jawa Tengah, Jumat malam 6 November 2026.

Acara pernikahan GRAj Ancillasura Marina Sudjiwo atau Gusti Sura dengan KPH FX Adimas Rosidian itu dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama keluarga.

Gibran Rakabuming Raka tiba lebih dahulu bersama istrinya, Selvi Ananda. Tak lama berselang, Jokowi dan Iriana Jokowi menyusul. Begitu juga dengan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, bersama istrinya, Erina Gudono, dan anak mereka.

Kedatangan keluarga Jokowi disambut langsung oleh KGPAA Mangkunegara X yang keluar dari Ndalem Ageng. Mereka sempat berbincang hangat sebelum memasuki area resepsi.

Kedatangan keluarga Jokowi disambut langsung oleh KGPAA Mangkunegara X yang keluar dari Ndalem Ageng. Mereka sempat berbincang hangat sebelum memasuki area resepsi.

Gibran dan Selvi, bersama Jokowi serta Iriana, kemudian menempati tempat duduk di Paringgitan. Sementara itu, Kaesang dan Erina berada di Pendapa Ageng. Gibran juga sempat menyapa awak media yang menunggu di lokasi dengan ucapan singkat, "Malam."

Selain keluarga Jokowi, sejumlah tokoh penting turut menghadiri resepsi pernikahan GRAj Ancillasura Marina Sudjiwo atau Gusti Sura dengan KPH FX Adimas Rosidian tersebut.

Di antaranya Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama GKR Hemas dan putri-putrinya, serta KGPAA Paku Alam bersama GKBRAA Paku Alam. Hadir pula Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, putri Presiden ke-2 RI Soeharto, bersama keluarga Cendana.

KGPAA Mangkunegara X menyambut sejumlah tamu kehormatan tersebut. Pertemuan para tokoh itu juga diwarnai perbincangan hangat di lingkungan Pura Mangkunegaran.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono turut datang ke lokasi sekitar pukul 19.31 WIB. Namun, keduanya hanya berada di ruang transit dan meninggalkan Pura Mangkunegaran sekitar 30 menit kemudian tanpa memasuki area utama resepsi.

Ketua Panitia Dhaup Ageng, Sherly Karina, sebelumnya mengatakan pihak Mangkunegaran mengundang banyak tamu VIP yang memiliki hubungan dengan Pura Mangkunegaran.

Undangan VIP diberikan untuk resepsi pertama maupun kedua. Pihak panitia juga mengundang seluruh perangkat kenegaraan, mulai dari tingkat provinsi hingga Kota Solo.

NASIONAL

DPR Buka Peluang Bahas RUU Penyadapan usai Prabowo Disadap Listyo Sigit Cs

Oleh Redaksi · 7 Nov, 08.48 WIB



BANDA ACEH - DPR mempertimbangkan untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan langkah tersebut karena DPR masih dalam masa reses. Pembahasan lebih lanjut akan mempertimbangkan dinamika yang berkembang saat masa sidang kembali dimulai.

"Iya, kita belum bisa, saya belum bisa jawab karena sedang masa reses ini," kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat dikutip, Sabtu (7/11/2026).

Meski demikian, Dasco membuka kemungkinan pembahasan RUU Penyadapan dipercepat setelah DPR kembali memasuki masa sidang.

"Nanti kemudian kemungkinan dinamika yang ada mungkin akan dibahas mengenai apakah itu perlu dipercepat atau bagaimana," tuturnya.

RUU Penyadapan sendiri telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira Polri menjadi salah satu isu yang kembali mendorong perhatian terhadap regulasi penyadapan.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi yang ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (5/11/2026).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.

Selain nomor telepon Presiden Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh Politik, aktivis, hingga media

NASIONAL

Menakar Hukuman untuk Listyo Sigit, Pakar: Di Luar Negeri, Pengkhianat Dihukum Mati

Oleh Redaksi · 6 Nov, 18.19 WIB

BANDA ACEH - Skandal Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo yang melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak mulai dari pengusaha hingg presiden dinilai bukan sekadar kejahatan siber biasa, melainkan sebuah pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara dari Indonesia.Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memberikan sorotan tajam atas status hukum komplotan jenderal polisi tersebut yang dinilainya terlampau "beruntung" hidup dalam era demokrasi di Indonesia.

Pangi meluapkan kegeramannya. Ia menelanjangi realitas bahwa kejahatan sekelas mematamatai kepala negara sejatinya adalah bentuk makar fatal yang tidak memiliki ruang ampun di banyak negara.

Para tersangka, menurutnya, harus bersyukur karena di tanah air mereka masih diberikan hak untuk bernapas dan melalui mekanisme hukum reguler, dimulai dari sekadar sidang etik internal kepolisian.

"Syukur kita negara demokrasi, kalau era rezim dulu, akhir dari sebuah pengkhianatan pasti hilang, enggak bakal ada suara," kata Pangi dikutip Jumat (6/11/2026).

Pangi kemudian membeberkan komparasi mengerikan mengenai nasib para aktor intelijen gelap apabila operasi sabotase serupa dilakukan di negara-negara dengan sistem hukum yang keras. Hukuman bagi pembangkang negara di rezim otoriter sudah pasti berujung pada eksekusi pencabutan nyawa.

"Kalau di negara Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran? Nasibnya pasti sudah dipastikan di-dor, dipenggal, berakhir di tiang gantung," tegas Pangi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.

NASIONAL

Cak Imin Ngaku Ikut Jadi Korban Sadap Listyo Sigit Cs: Sangat Kurang Ajar!

Oleh Redaksi · 6 Nov, 17.56 WIB



BANDA ACEH - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar perangkat komunikasi Presiden Prabowo Subianto ternyata turut menyeret nama sejumlah tokoh Politik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar bahkan mengaku nomor telepon pribadinya diduga ikut menjadi target dalam operasi tersebut.Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Ia mengecam keras tindakan penyadapan tanpa izin tersebut dan menilai pihak-pihak yang melakukannya telah bertindak keterlaluan.

"Terus terang ya, itu kurang ajarlah yang menyadap itu gitu lho. Itu kurang ajar betul.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id
Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kepala BIN Herindra Buka Suara soal Kasus Penyadapan Presiden, Ada Kata Makar!

Oleh Redaksi · 6 Nov, 17.28 WIB

BANDA ACEH - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra memberikan pernyataan tegas terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dia menilai tindakan tersebut tidak sekadar ilegal, tetapi mengarah pada makar.

Pernyataan itu disampaikan Herindra saat mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Saat ditanya mengenai kasus penyadapan tersebut, dia secara terbuka menyampaikan penilaiannya.

"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," kata Herindra.

Kedatangan Kepala BIN ke Istana ternyata juga membawa agenda khusus.

Herindra mengaku ingin bertemu langsung dengan Prabowo karena ada hal penting yang perlu disampaikan kepada Presiden.

"Saya harus ada yang dilaporkan ke Presiden," ujarnya.

Sementara itu, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo telah menyeret empat nama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan penyadapan terhadap Prabowo disebut berlangsung sejak 2025.

Perkembangan kasus ini juga berujung pada pencopotan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Prabowo pada Rabu (4/11).

Pernyataan Herindra yang mengaitkan kasus tersebut dengan dugaan makar semakin menambah perhatian terhadap proses hukum yang melibatkan empat tersangka tersebut.

NASIONAL

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Oleh Redaksi · 7 Nov, 08.43 WIB



BANDA ACEH - Tokoh Papua, Habelino Sawaki, SH., MSi (Han), menilai anggapan bahwa kasus dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto merupakan pengalihan isu sebagai kesimpulan yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan substansi persoalan.

Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan perkara luar biasa yang tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi menyentuh aspek keamanan negara, kewibawaan pemerintahan, bahkan kemungkinan adanya agenda Politik yang lebih besar apabila ditemukan bukti keterkaitan dengan upaya penggulingan kekuasaan.

Habelino mengatakan, publik perlu menggunakan logika yang sehat dan berpikir kritis dalam menyikapi perkembangan kasus dugaan penyadapan telepon Presiden yang menyeret seorang jenderal berinisial LSP. Terlebih, apabila dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan banyak orang yang memiliki jabatan strategis di lingkungan institusi negara, persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai tindakan individual.

"Logika pengalihan isu terjadi ketika sebuah persoalan besar sengaja dialihkan dengan memunculkan persoalan lain yang lebih kecil untuk menggeser perhatian publik", ujar Habelino dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 6 November 2026.

Sementara itu, dugaan penyadapan komunikasi seorang kepala negara justru merupakan persoalan yang sangat besar, serius, dan menggemparkan, bahkan jauh lebih besar daripada isu demonstrasi massa, kebakaran hutan, dan berbagai persoalan lainnya.

"Bagaimana mungkin sebuah kasus yang skalanya jauh lebih besar disebut sebagai pengalihan isu dari persoalan yang lebih kecil?" ungkapnya.

Ia menegaskan, apabila dugaan penyadapan dilakukan melalui koordinasi sejumlah pihak dengan memanfaatkan akses, kewenangan, dan jabatan strategis dalam institusi negara, penyidik harus mengungkap apakah terdapat operasi yang terorganisasi dengan tujuan tertentu.

"Sebab, penggunaan kewenangan dan fasilitas strategis negara untuk mengakses komunikasi Presiden merupakan persoalan serius yang dapat mengganggu sistem perlindungan informasi dan keamanan pemerintahan," jelasnya.

Lanjut Habelino, hal yang perlu didalami bukan hanya aktivitas penyadapan, melainkan juga kemungkinan adanya rantai komando, pembagian peran, sumber pendanaan, aliran informasi, serta pihak yang menjadi pengendali operasi.

Apabila seluruh unsur tersebut mengarah pada satu tujuan politik, yakni melemahkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka penyidik harus menguji kemungkinan terpenuhinya unsur tindak pidana makar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Ini tidak boleh berhenti pada siapa operator penyadapannya. Harus dibuka siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, siapa yang menerima hasil penyadapan, dan untuk kepentingan apa informasi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pengamat Bongkar Siasat Jokowi Pamer Ijazah: Sengaja Biar Publik Lupa Kasus Dugaan Makar

Oleh Redaksi · 6 Nov, 17.48 WIB

BANDA ACEH - Pengamat Politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio alias Hensa, mencurigai ada strategi Politik di balik keputusan Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan ijazahnya secara terbuka di persidangan.Menurut Hensa, aksi mantan Presiden ke-7 RI tersebut berpotensi menjadi cara untuk mengalihkan perhatian publik dari polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Hensa mengakui kedatangan Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (5/11/2026) memang telah dijadwalkan. Namun, ia mengaku tidak menyangka Jokowi akan menunjukkan dokumen pendidikannya secara gamblang di hadapan kamera dan awak media.

"Dia memang menjadwalkan datang, itu saya enggak bantah. Tapi tadinya saya yakin dia enggak akan menunjukkan ijazahnya secara gamblang seperti itu," kata Hensa melalui kanal YouTube Hendri Satrio Official, Jumat (6/11/2026).

Ia justru mempertanyakan momentum Jokowi memperlihatkan ijazah yang berdekatan dengan terbongkarnya kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo.

"Jadi pertanyaannya bukan soal 5 November. Pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya berdekatan dengan terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo," ujarnya.

Hensa menduga isu penyadapan berpotensi menimbulkan tekanan politik terhadap Jokowi, terlebih karena publik selama ini mengaitkan mantan presiden tersebut dengan sejumlah mantan pimpinan Polri, termasuk dalam konteks kasus yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.

Ia kemudian mengajukan dugaan bahwa isu ijazah sengaja dimunculkan agar Jokowi tidak terus-menerus mendapat pertanyaan wartawan mengenai penyadapan.

"Ini analisa saya ya, ini cara dia menghindari pertanyaan wartawan soal kasus penyadapan. Daripada orang ketemu dia nanyain penyadapan, nanyain kecurigaan keterlibatan, mendingan dia keluarkan isu lain. Apa itu? Ijazah," kata Hensa.

Menurutnya, Jokowi akan lebih mudah menjawab pertanyaan mengenai ijazah karena dokumen tersebut sudah lama menjadi bagian dari polemik yang dihadapinya.

"Kalau ditanya ijazah, dia lebih enak menjelaskan. Ijazah saya kan sudah saya tunjukkan. Daripada ditanya, 'Pak, gimana itu penyadapan?' Lagi pusing dia," ucapnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tindakan Listyo Sigit Dkk Diduga Buat Pantau Sikap Prabowo soal Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 7 Nov, 08.16 WIB



BANDA ACEH - Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Dkk diduga berkaitan dengan upaya memantau sikap dan langkah kepala negara terkait persoalan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Tokoh pergerakan dan pro demokrasi, Andrianto Andri menilai, dugaan penyadapan tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan Politik dinasti yang selama ini menjadi sorotan publik. Ia menyebut tindakan itu sebagai instrumen yang mencederai institusi Polri sebagai alat negara.

"Peristiwa penyadapan ini merupakan sebuah instrumen yang sangat mencederai Bhayangkara Polri sebagai alat negara," kata Andrianto kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

Andrianto mengklaim, selama era Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi, khususnya periode kedua ketika Polri dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), kepolisian telah dijadikan alat kekuasaan.

"Selama ini terutama di era Jokowi, terutama periode kedua ketika Polri dipimpin oleh Sigit sangat terlihat politik menjadi alat kekuasaan," ujarnya.

Menurut Andrianto, kondisi tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang memisahkan Polri dari ABRI.

"Seharusnya Polri sudah menjadi instrumen sipil. Alat kekuatan yang di luar domain kekuasaan tetapi LSP terutama menjadikan Polri alat kekuasaan," tutur Andrianto.

Andrianto kemudian menjelaskan alasannya mengaitkan dugaan penyadapan terhadap Prabowo dengan persoalan ijazah Gibran.

Menurut dia, isu ijazah Gibran yang kembali mencuat pada 2026 diduga menjadi salah satu latar belakang munculnya upaya memantau sikap Presiden Prabowo.

"Beranjak ke tahun 2026 soal isu ijazah Gibran ditanyakan dan ditagih semakin mencuat, ini yang menjadi dasar Jokowi perlu untuk memata-matai apa tindakan sikap Presiden Prabowo terhadap persoalan ini," bebernya.

Ia mengklaim, penyadapan tersebut dilakukan untuk mengetahui sikap dan langkah yang akan diambil Prabowo dalam menyikapi persoalan tersebut.

"Tidak mungkin melakukan penyadapan tanpa maksud-maksud tertentu, tidak lain mengorek sikap dan tindakan apa yang akan dilakukan Prabowo terhadap persoalan yang krusial ini dalam kasus Gibran," terang Andrianto.

Lebih lanjut, Andrianto mengaku yakin terdapat aktor intelektual di balik dugaan penyadapan tersebut.

"Kami yakin pasti ada aktor intelektualnya di kasus penyadapan ini," tegasnya.

Ia kemudian menyinggung struktur komando Polri dan hubungan kepemimpinan antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi.

"Polri ada dua atasan yaitu Presiden Prabowo, yang kedua LSP gelap mata yaitu kepada mantan Presiden yang telah mengangkat dirinya …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Seskab Teddy Indra Wijaya Ikut Diperiksa dalam Kasus Sadap Prabowo

Oleh Redaksi · 6 Nov, 17.36 WIB

BANDA ACEH - Salah satu tokoh pendiri Partai Gerindra di Wilayah Sumatera, Rahmat Sorialam Harahap, meminta penyidik Bareskrim Polri tidak melewatkan satu pun petunjuk yang berpotensi mengungkap perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, ia membuka kemungkinan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dimintai keterangan apabila penyidik menemukan informasi yang relevan.

Menurut Rahmat, pemeriksaan terhadap siapa pun yang dianggap memiliki informasi penting merupakan kewenangan penyidik.

Karena itu, Teddy pun dapat dimintai keterangan jika keterangannya dinilai mampu membantu memperjelas perkara.

"Kalau penyidik menilai Pak Teddy memiliki informasi yang bisa membantu memperjelas perkara, silakan dimintai keterangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kejaksaan Agung Malaysia Tunda Tahanan Rumah Najib Razak meski Sudah Bayar Jaminan Rp222 Miliar

Oleh Redaksi · 7 Nov, 08.26 WIB



BANDA ACEH - Mantan Perdana Menteri MalaysiaNajib Razak tetap ditahan di penjara meski sudah membayar uang jaminan 50 juta ringgit atau sekitar Rp222 miliar. Najib seharusnya menjalankan sis masa tahanannya di rumah sejak Jumat (6/11/2026) berdasarkan izin Pengadilan Tinggi, namun pelaksanaanya ditunda.

Kejaksaan Agung Malaysia tiba-tiba menangguhkan status tahanan rumah Najib sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Pengacara Najib memprotes langkah kejaksaan tersebut dengan mengatakan, seluruh syarat yang ditetapkan oleh Raja Malaysia terkait pengampunan Najib telah dipenuhi, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menangguhkan.

Mereka menuntut agar Najib segera dibebaskan dan ditempatkan di tahanan rumah.

Sementara itu Kejaksaan Agung Malaysia mempertanyakan soal penerapan pengampunan raja serta perintah pengadilan terhadap Najib terkait skandal korupsi dana miliaran dolar AS 1Malaysia Development Berhad (1MDB) .

Inti dari perselisihan, jelas Kejaksaan Agung, apakah pembayaran denda berarti mengakhiri hukuman Najib dalam kasus korupsi yang lebih dulu diproses, yakni penggelapan dana SRC International, atau hanya memungkinkan untuk menjalani sisa hukuman di bawah tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.

Najib menjalani hukuman penjara 12 tahun sejak Agustus 2022, kemudian mendapat pengampunan raja pada 2024 yang mengurangi separuh hukuman serta diskon denda dari 210 juta menjadi 50 juta ringgit.

Setelah itu, pengampunan kerajaan kedua pada September 2026, bersyarat dan diberikan oleh Raja Sultan Ibrahim, memungkinkannya untuk menjalani sisa hukuman di bawah tahanan rumah, dengan beberapa syarat salah satunya membayar denda.

Dalam pernyataannya, Kejaksaan Agung menegaskan kasus ini melibatkan "pertanyaan hukum yang kompleks" mengenai pelaksanaan pengampunan kerajaan dan perintah pengadilan. Kejaksaan menggambarkan situsai ini belum pernah terjadi sebelumnya.

“Selama periode ini, status penahanan Najib harus tetap tidak berubah di tempat penahanannya saat ini, tunduk pada wewenang dan arahan dari otoritas terkait,” bunyi pernyataan.

Kejaksaan juga menegaskan, keputusan tersebut tidak dimaksudkan untuk menentang atau membatalkan perintah raja, namun sekadar memastikan pengampunan kerajaan dan perintah pengadilan dilaksanakan sesuai hukum.

Peninjauan hukum lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah pembayaran denda 50 juta ringgit hanya memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman dalam kasus SRC International sebagai tahanan rumah atau secara efektif mengakhiri hukuman tersebut.

Perbedaan ini sangat penting karena Najib menghadapi hukuman lainnya yang terpisah dalam kasus 1MDB.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud MD Tegas Desak Pecat Eks Kapolri Listyo Sigit Tanpa Hormat, Sebut Skenario Sabotase

Oleh Redaksi · 7 Nov, 08.39 WIB



BANDA ACEH - -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto perlu diusut secara serius.

Dalam dialog eksklusif bersama Official iNews, Jumat (6/11/2026), Mahfud secara terbuka mendesak agar mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta para perwira tinggi yang terlibat segera dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari kepolisian sebelum proses peradilan pidana tuntas.

Menurutnya, langkah administratif ini berlandaskan regulasi yang sah dan preseden penegakan hukum internal kepolisian yang pernah diterapkan pada kasus-kasus besar sebelumnya.

"Pecat Listyo Sigit tidak dengan hormat dan semua yang sudah tersangka itu, karena sudah terbukti melakukan penyadapan. Itu adalah delik formal, tidak perlu dicari mana bukti makarnya; penyadapan itu sendiri sudah bukti," tandas Mahfud MD.

Mahfud menjelaskan bahwa tindakan penyadapan terhadap kepala negara merupakan pelanggaran hukum luar biasa serius.

Dalam konstruksi hukum pidana, penyadapan ilegal dikategorikan sebagai delik formal, di mana perbuatan itu sendiri telah melahirkan unsur pidana tanpa harus menunggu pembuktian niat makar di pengadilan.

Lebih jauh, Guru Besar Hukum Tata Negara ini mengingatkan bahwa pola-pola infiltrasi dan sabotase terhadap jalannya pemerintahan harus diusut hingga tuntas.

Ia mendorong agar institusi Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan baru memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pembersihan total (internal cleansing) dari unsur-unsur yang mencederai marwah negara.

Ia bahkan mengemukakan kemungkinan adanya motif yang lebih besar di balik tindakan tersebut, mulai dari sabotase hingga dugaan upaya makar.

Mahfud mengatakan, penyidik tidak boleh hanya berhenti pada siapa yang melakukan penyadapan dan bagaimana cara tindakan itu dilakukan.

Menurut dia, rangkaian peristiwa serta komunikasi pihak-pihak yang terlibat perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah ada tujuan lain yang mengancam keamanan negara.

Pandangan itu disampaikan Mahfud dalam wawancara eksklusif bersama iNews yang dipandu Cikal Mutazam dan ditayangkan pada Sabtu (7/11/2026).

Dalam wawancara tersebut, Mahfud mengingatkan bahwa penyadapan tanpa prosedur merupakan persoalan serius.

Ia menyebut tindakan tersebut dapat menjadi instrumen untuk membungkam hak politik warga, termasuk aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok prodemokrasi.

“Penyadapan itu adalah satu pelanggaran hukum yang serius. Bisa digunakan untuk membungkam hak-hak politik rakyat,” ujar Mahfud.

NASIONAL

Kasus Tambang Bengkulu Utara Berujung Penjara, Hakim Singgung Angka Fantastis Rp1,3 Triliun!

Oleh Van · 6 Nov, 17.24 WIB

BENGKULU — Mantan Bupati Bengkulu Utara, Imron Rosyadi, divonis 3 tahun 4 bulan penjara dalam kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan batu bara, Jumat, 6 November 2026.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu juga menjatuhkan denda Rp750 juta subsider 165 hari kurungan kepada Imron.

Dalam perkara yang sama, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bengkulu Utara, Fadilah Marik, dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 140 hari kurungan.

Hakim Ungkap Keuntungan Perusahaan Lebih dari US$83 Juta

Ketua Majelis Hakim Achmadsyah Ade Murry mengungkapkan, perkara tersebut berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah pihak melalui PT Ratu Samban Mining (RSM).

"Kedua terdakwa bersama-sama dengan terpidana Sonny Adnan yang sebelumnya sudah diputus, menguntungkan Jubaira dan Maihael Godath serta beberapa perusahaan lainnya sebesar 83 juta dolar AS lebih yang masuk ke dalam rekening PT Ratu Samban Mining," kata Achmadsyah saat membacakan putusan.

Majelis hakim menilai Imron dan Fadilah berperan aktif dalam tindak pidana korupsi terkait aktivitas pertambangan perusahaan tersebut.

Namun, hakim belum memasukkan persoalan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari pertimbangan karena dinilai masih berupa asumsi.

Berawal dari Pengalihan Izin Tambang pada 2007

Perkara ini bermula dari penerbitan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 327 dan 328 Tahun 2007.

Kedua keputusan tersebut mengatur pemindahan kuasa pertambangan dari PT Niaga Baratama kepada PT RSM untuk kegiatan eksploitasi, pengangkutan, dan penjualan batu bara.

Dalam dakwaan, Imron disebut menerima uang Rp600 juta dari Direktur Utama PT RSM saat itu, Sony Adnan, melalui Fadilah Marik.

Jaksa menyebut uang tersebut diberikan secara bertahap sekitar 2007 sebagai bagian dari pengurusan pemindahan izin pertambangan.

Penerbitan izin juga dinilai bermasalah karena tidak didukung rekomendasi teknis dan administratif dari instansi terkait.

Kedua Pihak Masih Punya Kesempatan Ajukan Banding

Sebelum putusan, jaksa menuntut Imron dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar.

Sementara Fadilah dituntut 4 tahun penjara serta denda Rp500 juta. Putusan hakim terhadap keduanya lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa.

Atas putusan tersebut, pihak terdakwa maupun jaksa masih memiliki kesempatan menentukan sikap, termasuk menerima putusan atau mengajukan banding.(*)

LINGKUNGAN

Kak Na Gaungkan Gerakan Menanam Sayur di Gampong

Oleh Aceh Barat · 6 Nov, 21.25 WIB

MEULABOH – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Aceh, Marlina Usman atau akrab disapa Kak Na, mendorong setiap gampong di Aceh mengembangkan kebun sayur sebagai upaya membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Pesan tersebut disampaikan Kak Na saat melakukan pembinaan Gampong Mawaddah Warrahmah (Gammawar) di Desa Cot Jurumudi, Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat, Jumat (6/11/2026). Kegiatan itu turut didampingi Ketua TP PKK Aceh Barat, Afrinda Novalia.

Dalam kunjungan tersebut, Kak Na bersama rombongan turut meninjau kebun TP PKK Desa Cot Jurumudi. Ia menegaskan, keberadaan kebun sayur di setiap gampong merupakan bagian dari program kerja Kelompok Kerja (Pokja) III TP PKK.

Menurutnya, pemanfaatan lahan untuk menanam sayuran dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus menekan biaya belanja rumah tangga. Ia juga mengajak para suami untuk ikut mendukung kegiatan berkebun bersama keluarga.

"Kami berharap setiap gampong di Aceh, bukan hanya di Aceh Barat, memiliki …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Politisi Senior PKS: DPR Jangan Biarkan Persoalan Ijazah Gibran Menggantung!

Oleh Redaksi · 7 Nov, 08.18 WIB



BANDA ACEH -Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mendukung pandangan beberapa politisi lintas fraksi DPR yang mendorong dilakukan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi Ijazah Gate Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Ia mencermati dari berbagai pernyataan elite partai Politik, terlihat dua pilihan utama yang berkembang, yakni penggunaan Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Menurutnya, beberapa tokoh partai cenderung mendorong opsi HMP, meskipun belum menjadi keputusan resmi fraksi-fraksi di DPR.

“Setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, terjadi eskalasi sikap partai-partai politik. Persoalan yang semula lebih banyak dipandang sebagai masalah administrasi pendidikan, kini berkembang menjadi persoalan konstitusional yang menyangkut legitimasi persyaratan jabatan Wakil Presiden,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

Ia menjelaskan, Hak Angket merupakan instrumen DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap proses dan kebijakan pemerintah. Sementara HMP merupakan mekanisme konstitusional untuk menyatakan pendapat DPR, termasuk mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Wakil Presiden.

"Kalau fakta hukum dinilai sudah cukup terang, tentu muncul pertanyaan, apakah DPR masih perlu melakukan penyelidikan melalui Hak Angket, atau langsung menempuh HMP. Saya melihat kecenderungannya mulai bergeser ke pilihan kedua. Namun semua harus tetap melalui mekanisme konstitusional,” tegasnya.

Lanjut Anggota DPR RI periode 2019-2024 ini, suasana politik semakin menghangat setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Meski merupakan persoalan hukum yang berbeda, kasus tersebut turut memperbesar perhatian publik terhadap tata kelola kekuasaan, integritas institusi negara, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.

"Dua persoalan ini memang tidak boleh dicampuradukan secara hukum. Tetapi secara politik, keduanya menciptakan suasana kebatinan yang semakin kritis terhadap praktik penyelenggaraan negara. Karena itu, respons partai-partai di DPR menjadi semakin penting,” jelasnya.

Mulyanto memperkirakan bahwa dalam sepekan ke depan, arah sikap partai-partai politik akan semakin jelas dan konkret, terutama setelah komunikasi antarfraksi dan konsolidasi politik berlangsung.

"Saya kira satu minggu ke depan akan menjadi masa yang menentukan. Apakah DPR memilih Hak Angket, langsung menggunakan HMP, atau mengambil langkah konstitusional lainnya. Yang terpenting, DPR jangan membiarkan persoalan ini menggantung. Negara hukum membutuhkan kepastian, bukan ketidakjelasan yang berkepanjangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

6 Perwira Ditangkap di Rumah Mantan Kapolri, Tetapi Bukan Listyo Sigit, Siapa Kira-kira?

Oleh Redaksi · 6 Nov, 16.24 WIB

BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa penangkapan enam pejabat tinggi dan menengah Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dilakukan pada malam Minggu, 1 November 2026, di kediaman seorang mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Mahfud MD menegaskan lokasi tersebut bukan rumah Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.

Dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyebut enam orang yang diamankan terdiri dari tiga Inspektur Jenderal (Irjen) dan tiga Komisaris Besar (Kombes).

Mereka kemudian mengaku melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atas perintah Listyo Sigit, yang saat itu masih menjabat Kapolri sebelum digantikan Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026.

Menurut keterangan Mahfud, setelah pengakuan itu, Listyo Sigit dijemput tengah malam (sekitar pukul 03.00 WIB) oleh Wakapolri dan Kabareskrim Polri.

Namun, ia dilepas kembali menjelang subuh (sekitar pukul 05.00 WIB). Mahfud menduga ada kemungkinan negosiasi, meski akhirnya Listyo tetap ditetapkan sebagai tersangka bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Perkara ini juga melibatkan dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal, dengan barang bukti berupa sejumlah ponsel, iPad, dan flashdisk.

Mahfud menolak menyebut identitas pemilik rumah secara terbuka.

“Itu nanti saja, enggak usah disebut, nanti akan muncul sendiri,” ujarnya.

Ia mengaku sudah mendengar informasi penangkapan sejak Senin-Selasa pagi dan memilih diam untuk melihat apakah proses akan dihentikan atau dilanjutkan.

Kasus ini dinilai Mahfud sebagai kejahatan terbesar dalam sejarah Polri karena menyasar kepala negara, bahkan berpotensi dikaitkan dengan dugaan makar, meski Yusril Ihza Mahendra menegaskan sejauh ini hanya menggunakan pasal penyadapan dan UU ITE.

Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka pada Selasa malam, 3 November 2026.

Listyo, yang sebelumnya juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan, telah ditahan.

Penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025–2026 tanpa prosedur resmi sesuai Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Hingga saat ini, nama pemilik rumah belum diumumkan resmi. Berdasarkan timeline, pengaruh, dan konteks politik yang muncul dalam pernyataan Mahfud …

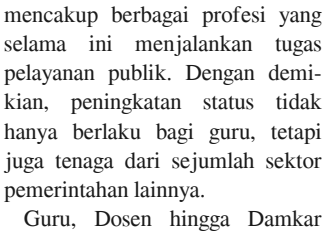
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pemerintah Putuskan P3K Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Ini Daftar Profesinya

Oleh Van · 6 Nov, 15.50 WIB



Momen konferensi pers resmi yang menunjukkan koordinasi antar instansi

JAKARTA — Pemerintah memutuskan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini tidak hanya menyasar tenaga pendidik, tetapi juga mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), tenaga medis, Satpol PP, hingga tenaga teknis lainnya.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah perhitungan sebelum menetapkan peningkatan status kepegawaian tersebut.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan maka hari ini kita memutuskan P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, ini termasuk lintas profesi," kata Prasetyo.

Menurutnya, kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi yang selama ini menjalankan tugas pelayanan publik. Dengan demikian, peningkatan status tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga tenaga dari sejumlah sektor pemerintahan lainnya.

Guru, Dosen hingga Damkar Masuk Daftar

Prasetyo menyebut dosen dan petugas pemadam kebakaran sebagai bagian dari kelompok yang akan memperoleh peningkatan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu.

"Ini termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar, sebagaimana kita ketahui damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat," ujar Prasetyo.

Selain dua profesi tersebut, pemerintah juga memasukkan tenaga kesehatan dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Kemudian satpol PP, kemudian nakes atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelaksana lain. Itu secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi P3K penuh waktu," sambungnya.

Dengan pengumuman tersebut, kelompok profesi yang disebut secara langsung dalam kebijakan ini meliputi dosen, petugas damkar, Satpol PP, tenaga medis, serta tenaga teknis atau tenaga pelaksana lainnya.

Sementara itu, guru juga termasuk dalam penataan status P3K paruh waktu yang telah disiapkan pemerintah untuk mulai berlaku pada 2027.

P3K Penuh Waktu Bisa Ikut Seleksi CPNS

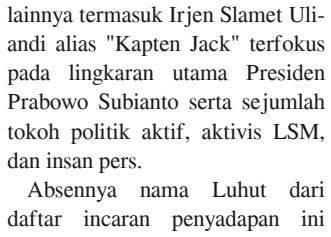
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Daftar Target Penyadapan Ilegal Terbongkar: Nama Luhut Tidak Ada

Oleh Redaksi · 6 Nov, 15.28 WIB



Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (kanan).

BANDA ACEH - Pusaran skandal penyadapan ilegal yang menjerat jenderal-jenderal polisi papan atas terus memicu spekulasi publik.

Di tengah deretan nama pejabat negara dan tokoh Politik papan atas yang masuk radar pengintaian gelap, satu nama besar dipastikan meleset dari daftar target dia adalah Luhut Binsar Pandjaitan.

Berdasarkan dokumen penanganan perkara dan keterangan penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri, nama tokoh senior yang dikenal memiliki pengaruh kuat di lingkaran pemerintahan tersebut sama sekali tidak tercantum dalam daftar tokoh yang disadap oleh para tersangka.

"Nama Luhut Binsar Pandjaitan tidak masuk dalam daftar target penyadapan yang dilakukan oleh para tersangka," ungkap sumber internal kepolisian terkait penanganan kasus mega-skandal ini.

Seperti diketahui, aksi penyadapan yang diotaki oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya termasuk Irjen Slamet Uliandi alias "Kapten Jack" terfokus pada lingkaran utama Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh politik aktif, aktivis LSM, dan insan pers.

Absennya nama Luhut dari daftar incaran penyadapan ini menimbulkan beragam tafsir di kalangan pengamat.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa daftar nama yang dikantongi penyidik murni berdasarkan temuan barang bukti digital dari instrumen monitoring center Bareskrim Polri.

Saat ini, Tim Khusus (Timsus) di bawah komando Kabareskrim Komjen Asep Safrudin terus mendalami motif di balik pemilihan daftar nama target penyadapan tersebut, sekaligus mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak yang memberikan perintah maupun mengeksekusi aksi ilegal ini.

Bareskrim Polri belum mengonfirmasi secara resmi daftar nama yang beredar luas di media sosial terkait kasus dugaan penyadapan ilegal (menggunakan sistem Lawful Interception Management System / LIMS) yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lainnya.

Dokumen tidak resmi yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp memuat sekitar 43 hingga 64 nama (dengan sebagian masih berupa inisial) dari berbagai kalangan, mulai dari Presiden, pejabat negara, tokoh politik, pimpinan ormas/LSM, pengusaha, hingga insan pers.

Sejumlah tokoh nasional yang namanya tercantum dalam daftar liar/belum terverifikasi tersebut meliputi:

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

7 BERITA

ACEH

Bupati Syech Muharram Apresiasi Pengurus PGRI, Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh Besar

Oleh Redaksi · 7 Nov, 18.26 WIB



KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pengurus Cabang (PC) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang baru dilantik untuk masa bakti 2025–2030.

Menurut Syech Muharram, PGRI memiliki peran penting sebagai wadah perjuangan sekaligus rumah bagi para guru dalam memperjuangkan kepentingan profesi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.

"Organisasi PGRI sangatlah penting dan harus menjadi rumah sekaligus benteng bagi para guru dalam memperjuangkan kepentingan profesi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Besar," ungkap Syech Muharram saat membuka Konferensi Kerja (Konker) II PGRI Aceh Besar Tahun 2026 yang dirangkai dengan pelantikan Pengurus Cabang (PC) PGRI se-Kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, Gampong Niron, Kecamatan Sukamakmur, Sabtu (7/11/2026).

Pada kesempatan itu, Syech Muharram mengatakan kekuatan PGRI sangat bergantung pada kepedulian dan kebersamaan seluruh pengurus. Menurutnya, organisasi tidak akan berkembang apabila setiap anggota hanya mengandalkan struktur kepengurusan tanpa disertai tanggung jawab bersama.

"Sehebat apa pun kita membangun benteng atau rumah, tanpa adanya kepedulian, jangan berharap organisasi itu akan maju. Peduli itu sangat penting. Kami berharap seluruh pengurus PGRI memiliki kepedulian terhadap organisasi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan para guru agar memiliki semangat pantang menyerah dalam menjalankan tugas pendidikan. Kekompakan dan persatuan, kata dia, menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan.

Selain persoalan organisasi, Syech Muharram turut menyinggung pelaksanaan program Beut Kitab Bak Sikula yang menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda.

Menurutnya, program tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya mempersiapkan generasi emas 2045. Karena itu, dukungan para guru sangat diperlukan dalam pelaksanaannya.

"Program Beut Kitab Bak Sikula ini merupakan bagian dari upaya membentuk karakter dan akhlak anak-anak kita. Kita tidak hanya ingin melahirkan generasi yang cerdas, tetapi juga memiliki dasar agama dan akhlak yang baik," katanya.

Selain itu, Bupati Aceh Besar juga mengungkapkan wacana pengembangan sekolah dengan sistem pembelajaran khusus bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi atau IQ di atas rata-rata.

Ia menjelaskan, konsep tersebut tidak dilakukan dengan membangun sekolah baru, melainkan memanfaatkan sekolah yang sudah ada dengan menerapkan sistem pembelajaran khusus sesuai kemampuan peserta …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Nanggroe Serukan Pengusutan Transparan dan Dialog Bermartabat Pascainsiden Pidie

Oleh Redaksi · 6 Nov, 20.11 WIB

BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menyerukan pengusutan secara menyeluruh dan transparan terhadap insiden yang terjadi di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, saat aparat keamanan melakukan penertiban pengibaran Bendera Bulan Bintang dalam kegiatan kenduri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Rabu (4/11/2026).

Insiden yang berlangsung di Meunasah Gampong Pulo Keunari tersebut mengakibatkan meninggalnya Abzalul Rizal (20), warga Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, serta menyebabkan sejumlah warga dan personel TNI mengalami luka-luka.

Menanggapi peristiwa tersebut, Wali Nanggroe menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban sekaligus menyerukan agar seluruh pihak mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum dan dialog yang bermartabat demi menjaga perdamaian Aceh.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas nama pribadi dan Lembaga Wali Nanggroe, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya, mengampuni segala kesalahannya, serta memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan," ujar Wali Nanggroe, Jumat (6/11/2026).

Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, selain menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Abzalul Rizal, Wali Nanggroe juga menyatakan keprihatinannya terhadap belasan warga yang mengalami luka-luka, termasuk perempuan dan seorang anak, serta sejumlah personel TNI yang turut menjadi korban dalam insiden tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Sambut Hari Pahlawan, Kapolda Aceh Ziarah ke Sejumlah Makam Tokoh Pahlawan

Oleh Redaksi · 7 Nov, 22.48 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Menyambut peringatan Hari Pahlawan ke-81, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan berziarah ke sejumlah makam tokoh pahlawan di Aceh, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sejumlah makam yang dikunjungi Kapolda Aceh meliputi makam Sultan Iskandar Muda di samping Pendopo Gubernur Aceh, makam Teuku Nyak Arif di Desa Meunasah Papeun, makam Laksamana Malahayati di Desa Lamreh, serta makam Teungku Chik di Tiro di Gampong Meureu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

Kapolda Aceh mengatakan, ziarah tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk mengenang sekaligus meneladani nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan.

Menurutnya, keberanian, patriotisme, semangat pantang menyerah, dan kecintaan terhadap tanah air merupakan nilai penting yang harus terus tertanam dalam diri setiap generasi, termasuk seluruh personel Polri.

Ia berharap, semangat kepahlawanan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi personel Polri untuk meningkatkan dedikasi dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, khususnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

"Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita warisi melalui pengabdian yang tulus, menjaga persatuan, serta memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Ruddi seusai melakukan ziarah.

Ia menambahkan, perjuangan pada masa kini harus diwujudkan melalui kerja nyata, integritas, dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Melalui momentum ini, mari kita semua, khususnya personel Polda Aceh, menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai landasan pengabdian. Dengan demikian, semangat para pendahulu tetap hidup dalam setiap pelaksanaan tugas," tutupnya.[]

ACEH

Pascainsiden di Pidie, Kapolda Aceh Imbau Masyarakat Tetap Tenang dan Tidak Terprovokasi

Oleh Redaksi · 6 Nov, 23.18 WIB

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengimbau masyarakat Aceh, khususnya Kabupaten Pidie, agar tetap tenang, menahan diri, dan tidak mudah terpancing emosi menyikapi insiden yang terjadi di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh situasi yang berkembang. Percayakan penanganan ini kepada TNI dan Polri. Kami juga meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum," kata Ruddi dalam konferensi pers bersama Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Pangdam IM Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, dan Pj. Sekda Aceh Taufik, di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Jumat (6/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh turut menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Abzalul Riza, warga Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu (4/11/) lalu.

Ia mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.

Terkait kondisi para korban, Ruddi menjelaskan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Aceh telah menjenguk mereka pada Kamis (5/11).

Sebanyak 13 orang mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis. Dari jumlah tersebut, 11 orang dirawat di RSU Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dan dua orang lainnya di RSU Tgk. Chik di Tiro Sigli.

"Dari 11 pasien yang dirawat di RSU Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, empat orang telah diperbolehkan pulang, sementara tujuh lainnya masih menjalani perawatan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pangdam IM dan Yusril Bakal Usut Tuntas Insiden di Pidie

Oleh Redaksi · 7 Nov, 14.17 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Pemerintah bersama TNI menegaskan komitmen untuk mengusut tuntas insiden yang terjadi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga meninggal dunia dan 13 orang lainnya menjadi korban.

Komitmen itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dalam konferensi pers di Gedung VVIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Jumat (6/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Yusril didampingi Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi, S.A.P., M.M.

Yusril mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan bersama Komnas HAM perwakilan Aceh. Tim Komnas HAM dijadwalkan turun ke Aceh pada Minggu (8/11/2026).

Penyelidikan tersebut dilakukan untuk mengungkap kronologi dan fakta peristiwa, termasuk memastikan penyebab luka yang dialami para korban.

Yusril juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Abzalul Riza (20). Ia berharap para korban lainnya segera pulih dan mendapatkan penanganan yang diperlukan.

Sementara itu, Pangdam IM menyampaikan bahwa Kodam Iskandar Muda tengah melakukan investigasi secara menyeluruh guna memastikan insiden tersebut ditangani secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait pengamanan di lokasi kejadian, Pangdam IM menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan awal dari prajurit yang bertugas, tidak seluruh personel membawa senjata api. Adapun munisi yang digunakan disebut berupa munisi hampa dan munisi karet.

Keterangan tersebut, kata dia, masih menjadi bagian dari proses pendalaman untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang terjadi.

Pangdam IM juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan serta keamanan di Aceh.

Dalam kesempatan itu, Yusril turut menegaskan bahwa pemerintah menghormati tradisi masyarakat Aceh dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Ia juga mengajak para ulama, teungku, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar persoalan pengibaran bendera bulan bintang tidak kembali memicu konflik.

Kedua pejabat tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri, menghormati proses penyelidikan, serta mempercayakan penanganan perkara kepada pihak berwenang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Patroli Bersepeda, Kapolda Aceh Sambangi SPBU dan Pastikan Distribusi BBM Lancar

Oleh Redaksi · 7 Nov, 21.06 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyambangi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Banda Aceh saat melaksanakan patroli menggunakan sepeda pada Jumat malam (6/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Aceh memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, patroli tersebut merupakan bagian dari upaya Kapolda Aceh untuk melihat langsung kondisi di lapangan, baik terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) maupun pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan sehari-hari warga.

"Dengan bersepeda menyusuri sejumlah ruas jalan, Kapolda Aceh memantau situasi sekaligus mengecek kondisi SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh BBM dengan mudah tanpa menghadapi antrean dalam proses pengisian," ujar Joko dalam keterangannya setelah kegiatan.

Ia menegaskan, Polda Aceh akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

"BBM akan kami awasi terus agar penyalurannya tepat sasaran dan masyarakat mudah mendapatkannya. Alhamdulillah, saat ini sudah tidak ada antrean lagi di SPBU," kata Joko.

Joko juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga situasi kamtibmas. Apabila menemukan gangguan keamanan atau kejadian yang membutuhkan kehadiran polisi, masyarakat diminta segera melapor melalui layanan Call Center Polri 110 atau mendatangi kantor polisi terdekat.[]

SPORT

Sabang Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah PORA XVI 2030

Oleh Redaksi · 6 Nov, 19.22 WIB



BANDA ACEH – Pemerintah Kota Sabang bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sabang resmi mengajukan pencalonan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Aceh (PORA) XVI Tahun 2030.

Berkas permohonan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, kepada KONI Aceh di Gedung KONI Aceh, Jumat (6/11/2026) siang.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota didampingi Ketua KONI Kota Sabang, Raja Darmawan, dan Plt. Sekretaris Daerah Kota Sabang Rinaldi Syahputra.

Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, mengatakan pengajuan tersebut merupakan langkah awal untuk menunjukkan keseriusan Kota Sabang dalam mengambil bagian sebagai tuan rumah salah satu ajang olahraga terbesar di Aceh. Menurutnya, PORA belum pernah diselenggarakan di Sabang sehingga kesempatan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi daerah untuk turut berkontribusi dalam penyelenggaraan olahraga tingkat provinsi.

"Kami berharap pencalonan ini bisa mendapat dukungan dan menjadi kesempatan bagi Sabang untuk menjadi tuan rumah PORA XVI 2030. Ini tentu membutuhkan persiapan dan kerja sama semua pihak, baik pemerintah daerah, KONI, insan olahraga maupun masyarakat," ujar Zulkifli.

Menurutnya, kesempatan menjadi tuan rumah PORA bukan hanya tentang penyelenggaraan kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi peluang bagi Sabang …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pemkab Aceh Besar Gelar Retret bagi 234 Keuchik, Perkuat Kepemimpinan Gampong

Oleh Redaksi · 6 Nov, 19.50 WIB

BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar akan menggelar kegiatan retret bagi para keuchik sebagai upaya memperkuat kapasitas dan integritas kepemimpinan pemerintahan gampong.

Kegiatan tersebut merupakan gagasan Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris dan Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil setelah keduanya mengikuti retret kepala daerah tingkat nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Besar, Jakfar, SP., M.Si., mengatakan, gagasan pelaksanaan retret bagi para keuchik berangkat dari pengalaman Bupati dan Wakil Bupati saat mengikuti kegiatan serupa di tingkat nasional.

Menurutnya, keduanya menilai kegiatan retret memiliki manfaat besar dalam memberikan pembekalan, menyelaraskan visi, serta memperkuat kepemimpinan. Karena itu, pengalaman tersebut ingin diterapkan di lingkungan pemerintahan gampong di Aceh Besar.

"Bapak Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris dan Bapak Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil termasuk kepala daerah yang berkesempatan mengikuti kegiatan retret kepala daerah se-Indonesia. Berawal dari pengalaman kegiatan beliau berdua dan menganggap kegiatan retret seperti ini sangat bermanfaat bila dapat dilaksanakan di Aceh Besar. Bupati Aceh Besar yang akrab disapa Syech Muharram ini menggagas program spektakuler ini, yakni menyelenggarakan kegiatan retret bagi para keuchik di Aceh Besar," ujarnya di Kota Jantho, Jumat (6/11/2026).

Jakfar menjelaskan, kegiatan tersebut mengusung tema "Memperkuat Kepemimpinan Keuchik untuk Mewujudkan Pemerintahan Gampong yang Profesional, Akuntabel, Responsif, Mandiri, dan Berdaya Saing."

Selain tujuan utama tersebut, retret diharapkan menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran informasi pembangunan antarpimpinan pemerintahan gampong.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan program pembangunan yang dilaksanakan para keuchik di gampong masing-masing, sekaligus memperkuat integritas kepemimpinan di tingkat gampong.

"Keuchik sebagai pimpinan pemerintahan di gampong merupakan perpanjangan tangan sekaligus pelaksana kebijakan dan pembangunan pemerintah kabupaten yang langsung berada di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin memperkuat kepemimpinan keuchik untuk mewujudkan pemerintahan gampong yang profesional, akuntabel, responsif, mandiri, dan berdaya saing," jelasnya.

Oleh karena itu, Pemkab Aceh Besar melalui DPMG memandang penting memberikan pembekalan kepada para keuchik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

SMSI Aceh Besar dan PB IPAR Gelar Pelatihan Jurnalistik, Cetak Generasi Kritis di Era Digital

Oleh Redaksi · 7 Nov, 15.00 WIB



ACEH BESAR – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar berkolaborasi dengan Pengurus Besar (PB) Ikatan Pemuda Aceh Besar (IPAR) menggelar Pelatihan Jurnalistik untuk Generasi Kritis di Hotel Permata Hati, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Mencetak Jurnalis Muda di Era Digital" tersebut menghadirkan pimpinan perusahaan media Beritamerdeka.net, Tarmilin Usman, sebagai pemateri.

Pelatihan ini diikuti kader-kader dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) lintas sektor serta organisasi paguyuban di Kabupaten Aceh Besar. Para peserta merupakan delegasi masing-masing organisasi yang ingin meningkatkan kemampuan menulis, memahami dunia jurnalistik, serta memperkuat literasi media di tengah perkembangan teknologi informasi.

Dalam pemaparannya, Tarmilin menyampaikan bahwa generasi muda Aceh Besar memiliki potensi besar untuk menjadi jurnalis profesional dan berintegritas. Namun, potensi tersebut harus diiringi dengan komitmen untuk mematuhi regulasi dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

"Menjadi jurnalis itu sebetulnya sangat mudah untuk dijalani dengan benar, asalkan kita konsisten mengikuti aturan-aturan yang ada," ujar Tarmilin di hadapan puluhan peserta.

Mantan Ketua PWI Aceh selama dua periode tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas dan independensi dalam menyajikan informasi. Menurutnya, seorang jurnalis tidak boleh mencampuradukkan opini maupun sentimen pribadi ke dalam produk jurnalistik.

"Ketika menulis berita, tidak boleh ada unsur kebencian terhadap seseorang sehingga memicu niat buruk yang dituangkan ke dalam teks berita. Berita yang kita buat harus selalu berimbang dan didukung oleh sumber yang jelas serta dapat dibuktikan kebenarannya," tegasnya.

Lebih lanjut, Tarmilin menjelaskan bahwa profesi wartawan bukan sekadar kemampuan menulis, tetapi juga membutuhkan komitmen, keberanian, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Menurutnya, minat yang kuat serta keberanian untuk menyuarakan kebenaran menjadi modal penting bagi generasi muda yang ingin terjun ke dunia jurnalistik, terutama di tengah derasnya arus informasi pada era digital.

Melalui pelatihan ini, SMSI Aceh Besar dan PB IPAR berharap dapat melahirkan jurnalis-jurnalis muda yang memiliki kemampuan, wawasan, serta integritas dalam memproduksi karya jurnalistik yang sehat, edukatif, dan tepercaya.[]

ACEH

Bupati Aceh Barat Sidak LPG 3 Kg, Pedagang Nakal Terancam Ditindak

Oleh Aceh Barat · 7 Nov, 15.49 WIB



Bupati Aceh Barat meninjau langsung ketersediaan tabung gas LPG 3 kg untuk memastikan pasokan aman bagi masyarakat,FOTO/HAI

MEULABOH – Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM bersama Polres Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap penjualan LPG bersubsidi 3 kilogram di sejumlah titik, termasuk Pasar Bina Usaha, Meulaboh, Sabtu (7/11/26).

Sidak tersebut dilakukan menyusul keluhan masyarakat terkait dugaan penjualan LPG 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dari hasil pemantauan, ditemukan LPG 3 kg dijual sekitar Rp20.000 per tabung. Namun, pemerintah juga menerima laporan adanya pedagang yang menjual hingga Rp35.000 bahkan Rp40.000 per tabung.

"Memang tadi ditemukan harga sekitar Rp20.000, tetapi ada laporan penjualan di atas Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung," kata Tarmizi.

Ia mengungkapkan, pemerintah sebelumnya telah memutus kerja sama dengan salah satu agen yang diduga terlibat dalam penjualan LPG seharga Rp40.000 per tabung setelah kasus tersebut viral di media sosial dan disertai bukti rekaman.

Tarmizi menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan bersama kepolisian, termasuk melalui pemantauan tertutup untuk mengungkap praktik penjualan di atas ketentuan.

"Jika ditemukan bukti penjualan di atas ketentuan, tentu akan kita tindak sesuai aturan hukum yang berlaku," tegasnya.

Ia juga meminta keuchik dan aparatur gampong ikut mengawasi distribusi LPG serta mengimbau masyarakat melaporkan langsung dugaan pelanggaran kepada pemerintah daerah, Satpol PP maupun kepolisian agar segera ditindaklanjuti.

Selain LPG, tim gabungan turut memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha. Harga cabai merah terpantau berkisar Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram.[]

Editor : Biro Meulaboh.

EKONOMI

Sempat Menguat Sehari Sebelumnya, IHSG Justru Dibuka Anjlok pada Jumat 6 November

Oleh Van · 6 Nov, 16.29 WIB

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 6 November 2026. Pada pukul 09.02 WIB, indeks turun 74,43 poin atau 1,48 persen ke level 4.955,83.

Pelemahan ini terjadi setelah IHSG menutup perdagangan Kamis, 5 November 2026, dengan penguatan 2,25 persen ke posisi 5.030,26.

Pada awal perdagangan Jumat, volume transaksi tercatat 19,28 juta lot dengan nilai sekitar Rp387,79 miliar. Pergerakan pasar masih perlu dipantau karena sesi pertama belum berakhir.

IHSG Dibuka Merah Setelah Menguat Sehari Sebelumnya

Penurunan IHSG pada awal perdagangan menunjukkan pasar belum mampu mempertahankan momentum penguatan sehari sebelumnya. Investor masih mencermati perkembangan pasar global dan sejumlah agenda ekonomi.

Pada perdagangan Kamis, sebanyak 440 saham menguat, 178 saham melemah, dan 99 saham bergerak stagnan. Saham BAJA, BELL, MKNT, UVCR, dan MSKY masuk jajaran top gainers pada penutupan hari tersebut.

Namun, daftar saham yang menguat pada Kamis tidak dapat dianggap sebagai top gainers perdagangan Jumat. Data individual saham pada pembukaan Jumat belum tersedia dalam laporan awal yang menjadi acuan artikel ini.

Wall Street dan Saham Teknologi Jadi Perhatian

Salah satu sentimen eksternal yang membayangi pasar adalah pelemahan bursa Amerika Serikat, terutama saham-saham teknologi. Pergerakan Wall Street menjadi perhatian investor karena dapat memengaruhi selera risiko di pasar saham global.

Perkembangan politik Amerika Serikat setelah pemilu sela juga menjadi perhatian. Perubahan peta kekuatan politik di Kongres memunculkan spekulasi mengenai arah kebijakan pemerintahan Donald Trump, termasuk konflik di Timur Tengah.

Harga minyak dunia yang sebelumnya mengalami penurunan tajam turut menjadi faktor yang dicermati pelaku pasar. Perubahan harga komoditas dapat memengaruhi saham-saham sektor energi dan barang baku.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi Penopang

Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2026 menjadi salah satu kabar positif. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 5,29 persen.

Capaian tersebut berpotensi memperkuat optimisme terhadap aktivitas ekonomi domestik. Namun, sentimen positif itu belum cukup menahan tekanan jual pada pembukaan perdagangan Jumat.

Investor juga mencermati perkembangan reformasi pasar modal dan kebijakan regulator. Langkah pengawasan serta penindakan terhadap dugaan pelanggaran di pasar saham menjadi perhatian setelah muncul kekhawatiran terkait transparansi pasar.

Saham Apa yang Perlu Dipantau?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ketidakhadiran Tito Karnavian dalam Pertemuan Purnawirawan Polri: Ada Apa?

Oleh Redaksi · 6 Nov, 16.52 WIB

BANDA ACEH - Pertemuan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada 5 November 2026 menjadi perhatian di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama besar di lingkungan kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pertemuan yang dipimpin Ketua Umum PP Polri Bambang Hendarso Danuri itu dihadiri sejumlah mantan Kapolri dan purnawirawan jenderal.

Mereka menyampaikan dukungan terhadap penegakan hukum serta menegaskan pentingnya menjaga soliditas institusi Polri.

Namun, ada satu nama yang menarik perhatian karena tidak terlihat dalam pertemuan tersebut, yakni Tito Karnavian, mantan Kapolri yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri.

Ketidakhadiran Tito menimbulkan pertanyaan, terlebih pertemuan berlangsung dalam situasi Politik dan institusional yang sensitif.

Apalagi, kasus yang sedang ditangani menyangkut dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak, serta melibatkan figur-figur penting di tubuh kepolisian.

Sejauh pemberitaan yang tersedia, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan Tito tidak hadir. Belum diketahui pula apakah seluruh mantan Kapolri memang diundang dalam pertemuan tersebut atau apakah Tito telah menerima undangan.

Karena itu, ketidakhadirannya tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai bentuk penolakan, ketidaksetujuan, atau sikap politik tertentu.

Dalam situasi seperti ini, membangun kesimpulan tanpa keterangan yang jelas justru berisiko melahirkan spekulasi.

Ketidakhadiran Tito sebenarnya bukan kali pertama menjadi perhatian dalam pertemuan yang melibatkan para mantan Kapolri.

Pada pertemuan mantan Kapolri dengan Kapolri Listyo Sigit pada 2022, Tito dan Idham Azis juga tidak terlihat hadir.

Pada kegiatan PP Polri tahun 2023, keduanya kembali tidak hadir dan saat itu Ketua PP Polri Bambang Hendarso Danuri menyebut adanya kesibukan lain.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

SMSI-IPAR Dorong Lahirnya Jurnalis Muda Berkualitas di Aceh Besar

Oleh Redaksi · 7 Nov, 00.30 WIB



ACEH BESAR– Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar berkolaborasi dengan Ikatan Pemuda Aceh Besar (IPAR) menggelar Pelatihan Jurnalistik untuk Generasi Kritis sebagai upaya meningkatkan literasi media, memperluas wawasan kepemudaan, serta mendorong lahirnya jurnalis muda yang profesional dan berintegritas di era digital.

Mengusung tema "Mencetak Jurnalis Muda di Era Digital", kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung Sabtu (7/11/2026) di Hotel Permata Hati, Aceh Besar, mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai.

Pelatihan ini mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda. Hingga Jumat (6/11/2026), sebanyak 100 peserta telah mendaftarkan diri. Peserta berasal dari kalangan pengurus Organisasi Kepemudaan (OKP) dan berbagai organisasi paguyuban yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

Tingginya antusiasme tersebut menunjukkan besarnya minat kalangan pemuda untuk menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang jurnalistik, sekaligus memahami peran media dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.

Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas generasi muda, khususnya dalam memahami dunia jurnalistik dan perkembangan media digital.

Menurutnya, kerja sama dengan IPAR tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga menjadi langkah strategis memperluas kemitraan SMSI dengan berbagai OKP dan organisasi paguyuban di Aceh Besar.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkenalkan SMSI kepada berbagai paguyuban dan organisasi kepemudaan di Aceh Besar sekaligus memberikan pemahaman tentang dunia jurnalistik kepada generasi muda. Kami berharap kolaborasi ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas dan berkelanjutan," ujar Zulfikar, Jumat (6/11/2026).

Ia menambahkan, pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut generasi muda memiliki kemampuan literasi media yang baik. Mereka tidak cukup hanya mampu menggunakan media sosial, tetapi juga harus memahami proses memperoleh, memverifikasi, mengolah, dan menyampaikan informasi secara benar dan bertanggung jawab.

"Pemuda harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan tidak mudah menerima maupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pemahaman jurnalistik menjadi salah satu bekal penting dalam menghadapi tantangan informasi di era digital," tambahnya.

Dalam pelatihan tersebut, panitia menghadirkan mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Aceh, Tarmilin Usman, sebagai pemateri.

Kehadiran tokoh pers Aceh tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta mengenai dasar-dasar jurnalistik, teknik penulisan berita, proses verifikasi informasi, kode etik jurnalistik …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LAPANGAN PEKERJAAN

Siap-siap! Mensesneg Umumkan Rekrutmen CPNS Dibuka pada November 2026

Oleh Redaksi · 6 Nov, 15.39 WIB



BANDA ACEH - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pemerintah akan membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada akhir 2026. "Pada kesempatan yang baik ini kami ingin juga mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026).Menurut dia, pembukaan rekrutmen CPNS dalam rangka penyegaran komposisi PNS menyusul pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Selain itu, program-program prioritas pemerintah juga membutuhkan PNS.

Prasetyo menjelaskan, seleksi tersebut rencananya akan dibuka pada November 2026. Adapun detail informasi terkait seleksi akan disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam waktu dekat.

"Bagi adik-adik kita, perlu kami sampaikan bahwa dipersilakan untuk mengikuti pengumuman dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengangkatan CPNS," kata Prasetyo.

Prasetyo menyampaikan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di sektor tenaga teknis dan pelaksana lainnya lintas profesi paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu. Dia mengumumkan kebijakan itu dalam jumpa pers usai rapat koordinasi pemerintah dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu ini termasuk lintas profesi, ya, itu termasuk dosen, kemudian damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis, tenaga pelayanan atau tenaga pelaksana lain," kata Prasetyo.

Dia menyebut, kebijakan itu menyusul keputusan pemerintah yang sebelumnya akan mengangkat PPPK guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Prasetyo menyampaikan, para PPPK paruh waktu yang nantinya diangkat menjadi penuh waktu juga berkesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS.

Dalam hal seleksi CPNS itu, Prasetyo menyebut, pemerintah akan memberlakukan perlakuan khusus, terutama yang berkaitan dengan masalah batasan usia. Untuk posisi tertentu, batasan usia akan dilonggarkan.

"Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Eks Direktur E BAIS Nilai Kasus Penyadapan Mengarah ke Kudeta Senyap, Mirip Pemberontakan PKI?

Oleh Redaksi · 6 Nov, 15.35 WIB



Mantan Direktur Intelijen TNI, Brigjen TNI (Purn) Poernomo. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Situasi Politik nasional kembali memanas menyusul terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama mantan petinggi kepolisian.

Isu hangat ini mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk dari mantan Direktur Intelijen TNI, Brigjen TNI (Purn) Poernomo.

Dalam diskusi mendalam di siniar Youtube Obor Rakyat Reborn, Poernomo memaparkan analisis intelijen terkait dinamika kekinian yang dinilainya sangat krusial.

Dia bahkan memaparkan bahwa situsi saat ini yang ada sedikit kemiripan dengan pemberontakan PKI.

Ia menamakannya kudeta senyap. Perbuatan yang mencoba menjatuhkan presiden sah namun tanpa peluru dan kekerasan.

Kasus penyadapan ilegal yang melibatkan eks Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi polri lainnya telah memicu polemik luas di tengah masyarakat.

Pemerintah melalui Mensesneg dan pihak Istana menyatakan bahwa persoalan ini tengah ditangani secara serius dan transparan, serta diserahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku.

Namun, dari sudut pandang analisis intelijen strategis, Brigjen (Purn) Poernomo menilai bahwa tindakan pemasangan alat sadap di lingkar kekuasaan tidak terjadi secara kebetulan atau berdiri sendiri.

Menurutnya, aksi tersebut membutuhkan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki akses langsung maupun tidak langsung ke pusat kekuasaan.

"Penyadapan ini bukan berjalan sendiri; ada tangan-tangan yang menempatkan alat tersebut dan mengelolanya selama bertahun-tahun. Ini adalah langkah awal untuk melakukan sebuah kudeta, bukan dengan letusan senjata, melainkan sebuah kudeta senyap (silent coup)," ujar Poernomo, dikutip fajar.co.id, Kamis (5/11/2026).

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa informasi dan rekaman yang diperoleh dari hasil sadapan tersebut dikhawatirkan digunakan sebagai instrumen tekanan psikologis untuk menggoyang stabilitas pemerintahan.

Sejumlah pengamat hukum dan politik sebelumnya juga menduga bahwa muara dari tekanan ini berkaitan dengan upaya melemahkan posisi Presiden Prabowo Subianto di tengah masa transisi kepemimpinan nasional.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

PSI Unggah Foto Jokowi Ambil Map, Pangi Syarwi: Jualan si Paling Terdzalimi Paling Laku di Indonesia

Oleh Redaksi · 6 Nov, 17.54 WIB

BANDA ACEH - Unggahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengambil map dokumen yang terjatuh saat menjadi saksi dalam sidang dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menuai tanggapan dari Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago.Melalui akun media sosialnya, PSI membagikan foto Jokowi yang terlihat membungkuk untuk mengambil dan merapikan map dokumen di lantai. Momen tersebut terjadi saat Jokowi memberikan kesaksian di PN Jakarta Timur pada Kamis (5/11/2026).

PSI menyebut sikap Jokowi selama persidangan menunjukkan ketertiban dan penghormatan terhadap proses hukum.

"Siapa yang tidak trenyuh melihat adegan ini? Pak Jokowi membungkuk untuk mengambil dan merapikan map dokumen saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Beliau menjalani proses persidangan dengan tertib dan penuh penghormatan terhadap hukum. Tidak ada kesan jumawa sama sekali," tulis PSI.

Menanggapi unggahan tersebut, Pangi menilai narasi yang membangun empati melalui momen kesedihan atau kesan sebagai pihak yang terzalimi mudah mendapat respons masyarakat.

"Jualan kesedihan terzalimi paling laku di Indonesia. Lagi ramai nangisin si Jack ngambilin map di lantai. Bagi masyarakat awam bisa netes air matanya," kata Pangi.

Ia kemudian melontarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Pangi menilai masyarakat mudah menunjukkan empati kepada mantan pemimpin, meskipun menurutnya masih ada persoalan dan pengalaman selama masa pemerintahan yang perlu diingat.

"Ramai-ramai empati, padahal sudah buat hidup lu tersiksa menderita, ugal-ugalan mengurus negara selama 10 tahun. Bangsa pelupa dan pemaaf. Tapi rakyatnya paling dermawan dan baik sama pemimpinnya," ujarnya.

Pangi juga menyinggung isu Politik identitas yang menurutnya menjadi salah satu persoalan pada era pemerintahan Jokowi.

"Oh iya, jangan lupa di era si Jack kita dibenturkan politik identitas," tambahnya.

Pernyataan Pangi tersebut merupakan tanggapan dan penilaian pribadinya terhadap unggahan PSI serta rekam jejak pemerintahan Jokowi.

DIGITAL

Krisis Bank Digital Guncang Paraguay, Jutaan Warga Tak Bisa Tarik Uang

Oleh Van · 6 Nov, 20.54 WIB



Krisis ekonomi di Paraguay memicu kekacauan massal di jalanan karena warga

ASUNCIÓN – Paraguay diguncang krisis perbankan serius setelah Ueno Bank, salah satu lembaga keuangan digital terbesar di negara Amerika Selatan tersebut, dihentikan operasionalnya oleh Bank Sentral Paraguay.

Keputusan itu membuat jutaan nasabah kehilangan akses sementara terhadap tabungan mereka, memicu kepanikan, antrean panjang di kantor bank, hingga demonstrasi yang berujung bentrokan dengan aparat keamanan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

PSMS Medan Hajar Persiraja 5-0, Puncak Klasemen Grup A Berpindah Tangan

Oleh Redaksi · 7 Nov, 22.02 WIB



BANDA ACEH, MEDAN – PSMS Medan tampil perkasa saat menjamu Persiraja Banda Aceh dalam lanjutan pekan kesembilan Pegadaian Championship Liga 2 2026/2027. Bermain di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu malam, 7 November 2026, tuan rumah menang telak 5-0 sekaligus mengambil alih posisi puncak klasemen sementara Grup A.

Hasil tersebut memperlihatkan perbedaan efektivitas permainan kedua tim. PSMS mampu memaksimalkan tekanan menjadi gol, sedangkan Persiraja kesulitan membendung serangan tuan rumah sepanjang pertandingan.

Sejak awal laga, Ayam Kinantan mengambil kendali permainan. Mereka terus menekan pertahanan Laskar Rencong dan memaksa tim tamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk meredam serangan.

Tekanan PSMS berbuah tiga gol pada babak pertama. Keunggulan tersebut menjadi modal bagi tuan rumah untuk mengendalikan pertandingan setelah turun minum.

Persiraja belum mampu menemukan cara untuk keluar dari tekanan. Sebaliknya, PSMS tetap bermain agresif dan kembali menambah dua gol pada babak kedua. Skor 5-0 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Kemenangan ini tidak hanya memberikan tiga poin bagi PSMS, tetapi juga mengubah peta persaingan di papan atas Grup A.

PSMS Geser Persaingan di Puncak Klasemen

Tambahan tiga poin membawa PSMS Medan mengoleksi 20 poin dari sembilan pertandingan. Mereka mencatatkan enam kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

PSMS kini menempati posisi pertama klasemen sementara Grup A. Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya aman karena PSPS Pekanbaru membayangi di peringkat kedua dengan 18 poin dari delapan pertandingan.

PSPS masih memiliki satu laga lebih sedikit. Artinya, peluang mereka untuk kembali merebut posisi teratas masih terbuka, bergantung pada hasil pertandingan berikutnya.

Di sisi lain, kekalahan dari PSMS membuat Persiraja Banda Aceh tertahan di peringkat ketujuh. Tim berjuluk Laskar Rencong itu baru mengumpulkan 10 poin dari sembilan pertandingan.

Bagi PSMS, kemenangan dengan selisih lima gol menjadi suntikan kepercayaan diri dalam menjaga persaingan menuju fase berikutnya. Konsistensi akan menjadi pekerjaan penting bagi Ayam Kinantan, terutama karena PSPS masih memiliki peluang memangkas jarak poin.

Sementara itu, Persiraja perlu segera mengevaluasi performa setelah kekalahan besar tersebut. Dengan kompetisi yang masih berjalan, Laskar Rencong membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi dan menjaga peluang bersaing di Grup A.[]

DIGITAL

IHSG Sempat Ambruk 3,78 Persen, 5 Saham Ini Justru Terbang hingga 190 Persen!

Oleh Van · 7 Nov, 20.05 WIB



Pantau pergerakan pasar saham secara real-time dengan grafik data yang mendalam.

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup pekan pertama November 2026 dengan koreksi 0,13 persen ke level 5.050,429. Di tengah gejolak pasar, sejumlah saham justru melonjak hingga lebih dari 100 persen.

Pergerakan indeks pada periode 2–6 November 2026 berlangsung tajam. IHSG sempat anjlok 3,78 persen pada Selasa, 3 November, sebelum kembali menguat dan menembus level 5.000.

Berdasarkan statistik mingguan Bursa Efek Indonesia (BEI), posisi IHSG turun dari 5.057,050 pada pekan sebelumnya. Kapitalisasi pasar juga menyusut 1,34 persen menjadi Rp8.744 triliun atau berkurang sekitar Rp118 triliun.

Rekap IHSG Sepekan: Sempat Jatuh, Lalu Bangkit

Pada Senin, 2 November 2026, IHSG mengawali pekan dengan penguatan 0,79 persen ke level 5.096,83. Sentimen positif datang dari surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2026 yang melampaui perkiraan pasar.

Namun, pada Selasa, 3 November, indeks berbalik anjlok 3,78 persen ke posisi 4.904,29. Tekanan pasar berlanjut di tengah kekhawatiran investor terhadap prospek pasar modal Indonesia.

Rabu, 4 November, IHSG hanya mampu naik tipis 0,32 persen ke level 4.919. Pemulihan lebih kuat terjadi pada Kamis, 5 November, ketika indeks melesat 2,25 persen menjadi 5.030,26.

Pada Jumat, 6 November, IHSG sempat bergerak di zona merah sebelum berbalik menguat 0,40 persen ke level 5.050,42. Meski demikian, kenaikan tersebut belum cukup menghapus koreksi sepanjang pekan.

Salah satu sentimen yang membayangi pasar adalah rencana MSCI mengonsultasikan kemungkinan penurunan status Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar mandiri atau standalone market. MSCI menyoroti transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi.

OJK juga mengakui ketidakpastian global, persepsi risiko investor, dan pengumuman MSCI turut memengaruhi pergerakan pasar modal domestik. Pemerintah dan regulator pun melanjutkan agenda reformasi transparansi untuk memperkuat kepercayaan investor.

5 Saham dengan Kenaikan Tertinggi Sepekan

Di tengah pelemahan IHSG, beberapa saham mencatatkan kenaikan harga yang jauh melampaui pergerakan indeks.

Berdasarkan statistik perdagangan mingguan BEI, berikut lima saham dengan penguatan tertinggi periode 2–6 November 2026:

• MKNT naik 190,91 persen ke Rp32 per saham.
• AIMS naik 125,96 persen ke Rp1.175 per saham.
• TMPO naik 56,99 persen ke Rp292 per saham.
• YUPI naik 51,20 persen ke Rp1.255 per saham.
• BAJA naik 21,05 persen ke Rp184 per saham.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Insya Allah Paling Lambat Idul Fitri 2027 Indonesia Punya Wakil Presiden Baru

Oleh Redaksi · 7 Nov, 15.13 WIB



Wacana pemakzulan wakil presiden menjadi sorotan dalam dinamika politik terkini. Gambar ini mengilustrasikan keterkaitan antara tokoh politik, lembaga legislatif, dan hukum. FOTO/AI.

Oleh: Tarmidzi Yusuf((Kolumnis))

UTRA sulung Presiden ke-7 Indonesia Jokowi yang saat ini menjabat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar-benar sedang berada di tepi jurang pemakzulan.

Gibran Rakabuming Raka tersandung kasus ijazah SMA atau sederajat.

Ia tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat seperti dipersyaratkan oleh Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan MK No 90 Tahun 2023 yang menyebutkan calon presiden dan calon wakil presiden berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

Gibran Rakabuming Raka lolos sebagai calon wakil presiden karena Putusan Mahkamah Konstitusi No 90 Tahun 2023 dan KPU tidak melakukan verifikasi terhadap surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA luar negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah.

Terkini, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang mengakibatkan Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Tidak punya ijazah SMA.

Situasi itu diperburuk dengan terbongkarnya skandal penyadapan oleh "Dewan Jenderal Polisi" pimpinan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Saat ini 4 (empat) jenderal polisi telah ditangkap dan dipenjarakan termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hanya seorang jenderal tidak ditahan karena alasan kesehatan. Rumornya ada lagi mantan Kapolri yang bakal jadi tersangka.

Kabarnya, Presiden Prabowo marah besar terhadap Listyo Sigit Prabowo yang disebut-sebut sebagai "komandan" operasi kudeta merangkak dalam skandal paling memalukan sejak Indonesia merdeka. Penyadapan terhadap Presiden RI.

Masih menurut info, Presiden Prabowo tambah marah besar setelah mengetahui tidak ada nama orang-orang Geng Solo yang disadap.

Kalaupun ada, seperti banyak disebut seorang ketua umum partai hanya untuk mengelabui publik.

Pasalnya, ketua umum partai yang dimaksud sering rapat di "markas" penyadapan di komplek rumah dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Pekan ini masa reses DPR berakhir. Prediksi penulis DPR langsung tancap gas. DPR akan menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan lebih dari 25 anggota DPR dari beberapa fraksi seperti diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Prediksi penulis, proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka akan berlangsung cepat. Meminimalisir serangan balik Geng Solo.

November 2026 bakal digelar Rapat paripurna DPR pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota …

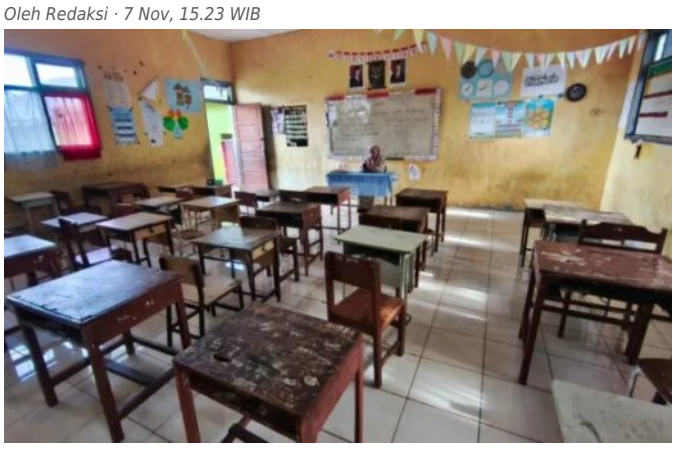
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Konflik Gajah dan Manusia di Aceh Tak Kunjung Selesai, 13 Sekolah di Bener Meriah Terpaksa Libur

Oleh Redaksi · 7 Nov, 15.23 WIB



BENER MERIAH – Konflik antara gajah liar dan manusia di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, kini semakin berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Bukan hanya mengancam keselamatan warga, konflik berkepanjangan ini juga mulai merampas hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan secara normal.Sedikitnya 13 sekolah terpaksa menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi menyusul meningkatnya ancaman pergerakan kawanan gajah liar yang kerap melintasi kawasan permukiman, bahkan pada siang hari.Tim Advokasi Jaringan Gajah Nusantara (JGN) Aceh yang turun langsung ke lokasi pada Sabtu (7/11/2026) menemukan sejumlah sekolah dalam kondisi sepi. Aktivitas pembelajaran hanya berlangsung secara daring dengan guru tetap memberikan materi kepada siswa.Tim Advokasi JGN Aceh, Yulham Eon, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, konflik yang terus berulang telah mengganggu kehidupan masyarakat, termasuk masa depan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak."Ya, kami melihat langsung kondisi di bener meriah, benar aktifitas sekolah sepi. Hanya ada guru yang sedang memberikan materi pembelajaran daring. Sangat disayangkan jika hal seperti ini terus berlanjut, anak-anak tidak bisa sekolah karena konflik satwa dan manusia disini masih terus terjadi," kata Yulham.Kritik terhadap penanganan konflik juga disampaikan Koordinator Wilayah Tengah Forum Jurnalis Lingkungan (FJL), Yusradi. Ia menilai persoalan konflik gajah dan manusia di kawasan tersebut bukanlah kejadian baru. Konflik terus berulang setiap tahun, bahkan telah menimbulkan korban jiwa, baik dari manusia maupun gajah Sumatera.Menurut Yusradi, kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan konflik belum menghasilkan solusi jangka panjang yang mampu melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjamin keberlangsungan hidup satwa dilindungi."Konflik ini sudah lama terjadi. Tidak ada penyelesaian yang serius dari pemangku kebijakan. Belum lama juga ada hibah lahan presiden untuk konservasi gajah sumatera di wilayah ini, tetapi setelah kami pantau, belum terlihat hasil yang baik," ujar Yusradi.Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bener Meriah melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar), Saidi, menyampaikan bahwa wilayah terdampak konflik gajah telah ditetapkan dalam kondisi darurat belajar selama 14 hari.Kebijakan penghentian sementara pembelajaran tatap muka telah diberlakukan sejak Kamis (5/11) dan akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi keamanan di lapangan."Sampai dengan hari ini sekolah masih diliburkan sejak Kamis, Jumat hingga Sabtu. Besok Senin nanti kita lihat lagi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

KTP Dicatut Orang Lain untuk Pinjol? Jangan Panik, Ini 7 Langkah untuk Melawan Teror Penagih

Oleh Van · 7 Nov, 15.04 WIB



Kemudahan akses identitas dengan KTP Digital di genggaman Anda.

JAKARTA — Penyalahgunaan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengajukan pinjaman online (pinjol) dapat menimbulkan masalah serius bagi korbannya.

Seseorang bisa tiba-tiba menerima pesan penagihan, bahkan diteror debt collector, meski merasa tidak pernah mengajukan pinjaman.

Kondisi tersebut perlu ditangani dengan hati-hati. Korban sebaiknya tidak terburu-buru membayar tagihan atau menghapus pesan dari penagih sebelum mengamankan bukti.

Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan seluruh bukti, memeriksa riwayat kredit melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta mengajukan pengaduan kepada pihak terkait.

Berikut sejumlah langkah yang dapat ditempuh ketika KTP diduga disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online dikutip dari YouTube Fintech.id Sabtu, (7/11/2026).

1. Kumpulkan Bukti Penyalahgunaan Data

Jangan langsung memblokir nomor penagih sebelum menyimpan bukti komunikasi. Dokumentasikan seluruh pesan, panggilan, dan ancaman yang diterima.

Beberapa bukti yang perlu disiapkan antara lain:

- Tangkapan layar pesan penagihan dan ancaman dari debt collector.

- Nomor telepon yang menghubungi serta identitas aplikasi pinjol yang disebutkan.

- Tautan aplikasi atau situs yang digunakan untuk mengajukan pinjaman.

- Bukti mutasi rekening untuk memeriksa apakah ada dana pinjaman yang masuk tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

- Bukti lain yang menunjukkan bahwa korban tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut.

Simpan bukti dalam beberapa salinan agar tidak hilang apabila ponsel mengalami kerusakan atau data terhapus.

2. Periksa Riwayat Kredit Melalui SLIK OJK

Langkah berikutnya adalah memastikan apakah identitas korban tercatat memiliki fasilitas kredit yang tidak pernah diajukan.

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau iDeb.

Masyarakat bisa mengakses layanan tersebut melalui portal resmi:

Jika ditemukan fasilitas kredit yang tidak pernah dibuat, segera ajukan sanggahan kepada lembaga jasa keuangan terkait.

Lampirkan bukti identitas, kronologi kejadian, serta dokumen pendukung agar laporan dapat ditindaklanjuti.

Perlu diketahui, pinjol ilegal belum tentu tercatat dalam SLIK. Karena itu, hasil pemeriksaan yang tidak menunjukkan adanya pinjaman bukan berarti penyalahgunaan data tidak terjadi.

3. Buat Laporan ke Kepolisian

Apabila terdapat indikasi pencurian atau penyalahgunaan data pribadi, korban dapat membuat laporan kepada kepolisian.

Laporan bisa disampaikan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres atau Polda terdekat.

Korban juga dapat menggunakan kanal pengaduan kejahatan siber melalui situs resmi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OTOMOTIF

Skuter Roda 3 Piaggio MP3 Dapat Penyegaran, Benamkan Radar 4D hingga Cruise Control

Oleh Redaksi · 7 Nov, 13.09 WIB



BANDA ACEH - Piaggio MP3 memasuki dua dekade perjalanan dengan berbagai pembaruan teknologi, mulai dari sistem suspensi dua roda depan independen hingga Advanced Rider Assistance System (ARAS) berbasis radar 4D. Skuter roda tiga ini terus mengadopsi teknologi yang sebelumnya banyak digunakan pada kendaraan roda empat.

Sejak diperkenalkan pada 2006, Piaggio MP3 menghadirkan konsep mobilitas baru melalui konfigurasi dua roda depan yang dapat miring secara independen. Teknologi tersebut terhubung dengan sistem suspensi khusus yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas, daya cengkeram, serta kenyamanan berkendara.

Dalam keterangan tertulisnya, Piaggio menyebut konfigurasi ini menjadi salah satu karakter utama MP3. Berbeda dengan skuter konvensional, dua roda depan memberikan bidang kontak lebih luas dengan permukaan jalan, termasuk ketika kendaraan melintasi kondisi jalan yang licin.

Perkembangan Piaggio MP3 juga terlihat dari penggunaan mesin dengan kapasitas yang semakin beragam. Setelah debut dengan mesin 250 cc, lini ini berkembang melalui pilihan mesin 125 cc, 300 cc, 350 cc, hingga 500 cc.

Kini, Piaggio MP3 tersedia dalam pilihan mesin 310 cc, 400 cc, dan 530 cc. Pengembangan tersebut turut mencakup peningkatan performa, pengendalian emisi, serta penyesuaian terhadap standar Euro 5+.

Pada 2009, Piaggio juga memperkenalkan MP3 Hybrid, yang menjadi skuter pertama di dunia dengan sistem penggerak hybrid. Teknologi tersebut menggabungkan mesin pembakaran internal dengan motor listrik untuk mengintegrasikan dua sumber tenaga dalam satu kendaraan.

Dari sisi keselamatan, MP3 mengadopsi ABS tiga kanal yang membantu mencegah roda terkunci ketika pengereman. Sistem tersebut dilengkapi Acceleration Slip Regulation (ASR), teknologi kontrol traksi yang membantu mencegah roda belakang kehilangan daya cengkeram saat berakselerasi di permukaan jalan berisiko, seperti aspal basah.

Radar 4D hingga Kamera Mundur

Pengembangan teknologi bantuan berkendara menjadi salah satu pembaruan penting pada generasi terbaru Piaggio MP3. Skuter ini menjadi yang pertama di kelasnya menggunakan Advanced Rider Assistance System (ARAS) berbasis 4D Radar Imaging. Teknologi radar tersebut menjadi dasar sistem bantuan berkendara untuk mendeteksi kondisi di sekitar kendaraan.

Pada varian tertinggi, Piaggio MP3 530 hpe Exclusive, sejumlah fitur yang lazim ditemukan pada mobil turut dihadirkan, termasuk cruise control dan kamera mundur.

Teknologi pencahayaan juga berkembang melalui penggunaan full-LED. Sementara itu, panel instrumen TFT berwarna menyajikan informasi kendaraan secara terintegrasi, termasuk berbagai data …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Dirjen WHO, Menguatkan Tata Kelola Kesehatan Dunia?

Oleh Rut sw · 7 Nov, 14.15 WIB



Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam kemitraan strategis bersama WHO.

OALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Indonesia mengirimkan surat keberatan kepada Dewan Eksekutif WHO pada tanggal 5 November 2026 untuk menolak pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) WHO periode 2027–2032.

Menurut koalisi, Kemenkeu tidak memenuhi kriteria Resolusi EB97.R10 Dewan Eksekutif WHO yang mewajibkan Dirjen memiliki latar belakang teknis serta kompetensi kesehatan masyarakat yang kuat, mengingat ia berasal dari latar belakang perbankan dan keuangan.

Ditambah rekam jejak kepemimpinannya di Kementerian Kesehatan dinilai kurang mencerminkan independensi ilmiah, perlindungan tenaga kesehatan, serta tata kelola yang inklusif, karena dianggap lebih fokus pada investasi alat kesehatan berbiaya tinggi dibanding penanganan masalah dasar seperti TBC, kusta, pembatasan kritik tenaga kesehatan, sentralisasi kebijakan, dan pengelolaan data genomik.

Niatan Indonesia Perbaiki Kesehatan Dunia dari Dalam Lembaga Global

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pencalonan ini merupakan upaya memperkuat peran Indonesia dan memperjuangkan arsitektur kesehatan global yang lebih adil bagi negara berkembang.

Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir.

Dirjen WHO saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, akan mengakhiri masa jabatannya pada 15 Agustus 2027.

Budi Gunadi akan bersaing dengan mantan direktur Regional WHO untuk Eropa Hans Kluge yang diusulkan Belgia, mantan menteri kesehatan Qatar Hanan Al-Kuwari, dan Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur Hanan Balkhy.

Masih menurut Menlu, sistem multilateral saat ini belum terlalu berpihak pada negara-negara berkembang.

Karena itu, Indonesia terus mendorong penguatan sistem multilateralisme melalui langkah reformasi.

Pencalonan Menkes Budi untuk memimpin WHO merupakan penegasan bahwa Indonesia hendak berperan lewat tindakan nyata bagi perbaikan tata kelola kesehatan dunia.

Indonesia yang saat ini duduk sebagai anggota Badan Auditor PBB, sekaligus berniat memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi internasional, semangat yang sama ketika Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030 nanti.

Kapitalisme Global Hanya Butuh Industri Kesehatan

Sepertinya pemerintah tidak melihat secara detil bagaimana penanganan vaksin global, ketika virus Covid-19 jelas-jelas menghantam berbagai negara di dunia hingga meluluhlantakan perekonomian, hingga hari ini pun belum sepenuhnya pulih.

Ditambah korban meninggal dunia, WHO mencatat total kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 162.059 jiwa dari total 6.812.127 kasus terkonfirmasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Prodi Pendidikan Doktor FKIP USK Gelar Sidang Disertasi Tertutup Pertama, Promovendus Pertama Dinyatakan Lulus

Oleh Hamdani · 7 Nov, 11.07 WIB



Tgk. Maya Silviyanti bersama tim penguji dan pembimbing usai dinyatakan lulus dalam sidang tertutup disertasi pertama Program Studi Pendidikan Doktor FKIP Universitas Syiah Kuala,

BANDA ACEH – Program Studi Pendidikan Doktor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (USK) mencatat tonggak sejarah baru dengan menggelar sidang tertutup disertasi pertama sejak program studi tersebut dibuka. Dalam sidang yang berlangsung Jumat (6/11/2026), promovendus pertama, Tgk. Maya Silviyanti, dinyatakan lulus setelah berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji.

Sidang dipimpin Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP USK, Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si., yang hadir mewakili Dekan FKIP USK. Momentum ini menjadi bagian penting dalam perjalanan pengembangan pendidikan doktor sekaligus penguatan mutu akademik di lingkungan FKIP USK.

Disertasi Maya berjudul "Integrating VOKI into Collaborative Avatar Video Storytelling to Enhance Speaking Skill and Explore Students' Engagement, Responses and Challenges (A Mixed-Method Study at SMPIK Nurul Qur'an Aceh Besar)."

Penelitian tersebut mengkaji pemanfaatan teknologi digital VOKI melalui metode bercerita menggunakan avatar secara kolaboratif untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan, respons, dan tantangan siswa selama proses pembelajaran di SMPIK Nurul Qur'an Aceh Besar.

Prestasi Maya semakin diperkuat dengan publikasi artikel hasil penelitiannya pada jurnal TEFLIN yang bereputasi internasional dan terindeks Q1. Capaian tersebut menunjukkan kontribusi penelitian doktoral FKIP USK dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi pembelajaran di tingkat internasional.

Sidang ini menghadirkan empat penguji, yakni Prof. Dr. Burhanuddin Yasin, M.Ed., Prof. Dr. Asnawi, M.Ed., Prof. Dr. Mailizar, M.Ed., serta Dr. Revathi Gopal dari Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia, sebagai penguji eksternal.

Maya menjalani proses penelitian dan penyusunan disertasi di bawah bimbingan Prof. Dr. Yunisrina Qismullah Yusuf, S.Pd., M.Ling., selaku Promotor; Prof. Dr. Sofyan, M.A., selaku Ko-Promotor I; serta Prof. Dr. Iskandar A.S., S.Pd., M.App.Ling., selaku Ko-Promotor II.

Ketua Program Studi Pendidikan Doktor FKIP USK, Dr. Sulastri, M.Si., menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan sidang tertutup pertama sekaligus kelulusan promovendus pertama merupakan tonggak penting bagi pengembangan program studi.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk menghasilkan penelitian doktoral yang berkualitas, inovatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan.

Ke depan, Program Studi Pendidikan Doktor FKIP USK berkomitmen memperkuat jejaring dan kerja sama internasional melalui kolaborasi penelitian, keterlibatan pakar dari perguruan tinggi luar negeri, serta publikasi ilmiah bersama.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

BISNIS

BEI Perkuat Ekosistem Pasar Modal melalui Sejumlah Inisiatif Strategis

Oleh Hamdani · 7 Nov, 11.16 WIB



Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 pada 5–7 November 2026 di Main Hall BEI, Jakarta, sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal Indonesia

JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar serangkaian inisiatif strategis sepanjang pekan pertama November 2026 untuk memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia. Langkah tersebut mencakup pengembangan perusahaan menuju penawaran umum perdana saham (IPO), peningkatan transparansi dan tata kelola perusahaan, serta perluasan literasi dan inklusi investasi masyarakat.

Sejumlah program yang dilaksanakan meliputi peluncuran Go Public Academy for SMEs, penyelenggaraan CEO Networking 2026, penyempurnaan keterbukaan informasi kepemilikan saham, hingga Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026.

Pada Senin (2/11/2026), BEI bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PT Surveyor Indonesia, serta sejumlah perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman sekaligus meluncurkan Go Public Academy for SMEs di Main Hall BEI.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang melalui RISE to IPO yang berfokus pada edukasi, peningkatan kapasitas, dan pendampingan perusahaan menuju IPO. Sejak 2025, program ini telah menjangkau 281 perusahaan di lima kota, yakni Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Bandung.

Melalui inisiatif tersebut, BEI mendorong perusahaan memperkuat tata kelola, kesiapan keuangan, transparansi, dan daya saing agar mampu memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan jangka panjang.

Pada tanggal yang sama, BEI juga menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00160/BEI/11-2026 tentang Perubahan Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham. Ketentuan baru ini mengatur publikasi informasi kepemilikan saham di atas 1 persen yang dilengkapi status pemegang saham sebagai Pengendali maupun Afiliasi Pengendali.

Informasi tersebut akan dipublikasikan secara bulanan melalui situs web BEI. Penyempurnaan ini diharapkan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai struktur dan konsentrasi kepemilikan saham sekaligus menjadi referensi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.

Selanjutnya, pada Selasa (3/11/2026), BEI bersama Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan CEO Networking 2026 di Raffles Hotel Jakarta.

Mengusung tema “Transforming Challenges into Value: Driving Growth and Increasing Trust through Transparency”, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 400 peserta dari kalangan pimpinan Perusahaan Tercatat dan pemangku kepentingan pasar modal.

Forum ini menjadi ruang pertukaran wawasan dan penguatan kolaborasi dalam menghadapi dinamika bisnis. Diskusi yang berlangsung menekankan pentingnya transparansi, tata kelola perusahaan yang baik, integritas, serta kualitas keterbukaan informasi untuk membangun kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Penjelasan Atlet MMA Yudi Cahyadi Soal Perseteruannya dengan Herri Pras Usai Singgung UAH dan UAS

Oleh Redaksi · 7 Nov, 08.35 WIB



BANDA ACEH - Atlet MMA Yudi Cahyadi mengungkapkan kronologi kedatangannya bersama sejumlah orang ke rumah konten kreator Herri Pras di Kabupaten Bogor. Yudi mengaku kedatangannya bertujuan mengajak Herri Pras berduel, tetapi ajakan tersebut disebut berulang kali ditolak.

Yudi menyebut, kedatangannya dipicu oleh sejumlah pernyataan dan konten Herri Pras yang dinilai mencela hingga menghina beberapa ulama. Di antaranya Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Tuan Guru Bajang, dan Habib Umar bin Hafiz.

"Setelah melihat banyak video dan berita yang beredar, saya perlu menjelaskan sekaligus meluruskan keadaan yang sebenarnya. Ya, betul, kemarin malam, kami datang ke rumah Herri Pras Al-Kaburi di Kabupaten Bogor," ujar Yudi melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (5/11).

Dia mengaku ingin menyelesaikan persoalan tersebut secara langsung. Terlebih, menurut Yudi, Herri Pras sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk bertarung dengan konsep no rules.

Yudi mengatakan, saat mendatangi rumah Herri Pras, dirinya tidak datang sendirian. Dia mengaku ditemani Ketua RT setempat dan kedatangan mereka disaksikan sejumlah warga. Menurutnya, awalnya persoalan tersebut hendak diselesaikan melalui pembicaraan baik-baik.

"Saya datang ditemani Bapak RT dan juga disaksikan oleh warga setempat. Dan awalnya juga kami datang serta bicara baik-baik," katanya.

Namun, situasi disebut berubah ketika Yudi meminta Herri Pras memenuhi tantangan duel satu lawan satu. Dia mengklaim ajakan tersebut disampaikan berulang kali, tetapi Herri Pras menolak dengan berbagai alasan.

"Saya langsung meminta untuk duel no rules satu lawan satu seperti yang dia minta. Tapi dia menolak dan selalu beralasan macam-macam," ungkapnya.

Yudi juga mengklaim Herri Pras memilih masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu karena takut menghadapi tantangan tersebut.

Dalam keterangannya, Yudi mengakui sempat melakukan tindakan fisik terhadap Herri Pras. Namun, dia berdalih tindakan tersebut hanya untuk memberikan pelajaran dan tidak membahayakan keselamatan.

"Saya memberi tindakan sedikit pelajaran, tapi itu pun terukur dan tidak membahayakan keselamatannya," jelas Yudi.

Menurut Yudi, Herri Pras tetap berada di dalam rumah hingga petugas kepolisian datang ke lokasi. Dia menyebut kedatangannya merupakan bagian dari upaya menyelesaikan persoalan secara langsung dengan konten kreator tersebut.

Meski demikian, pengakuan Yudi tersebut merupakan versinya mengenai kejadian di rumah Herri Pras. Kronologi dan dugaan tindakan kekerasan dalam peristiwa itu perlu dilihat berdasarkan keterangan seluruh pihak …

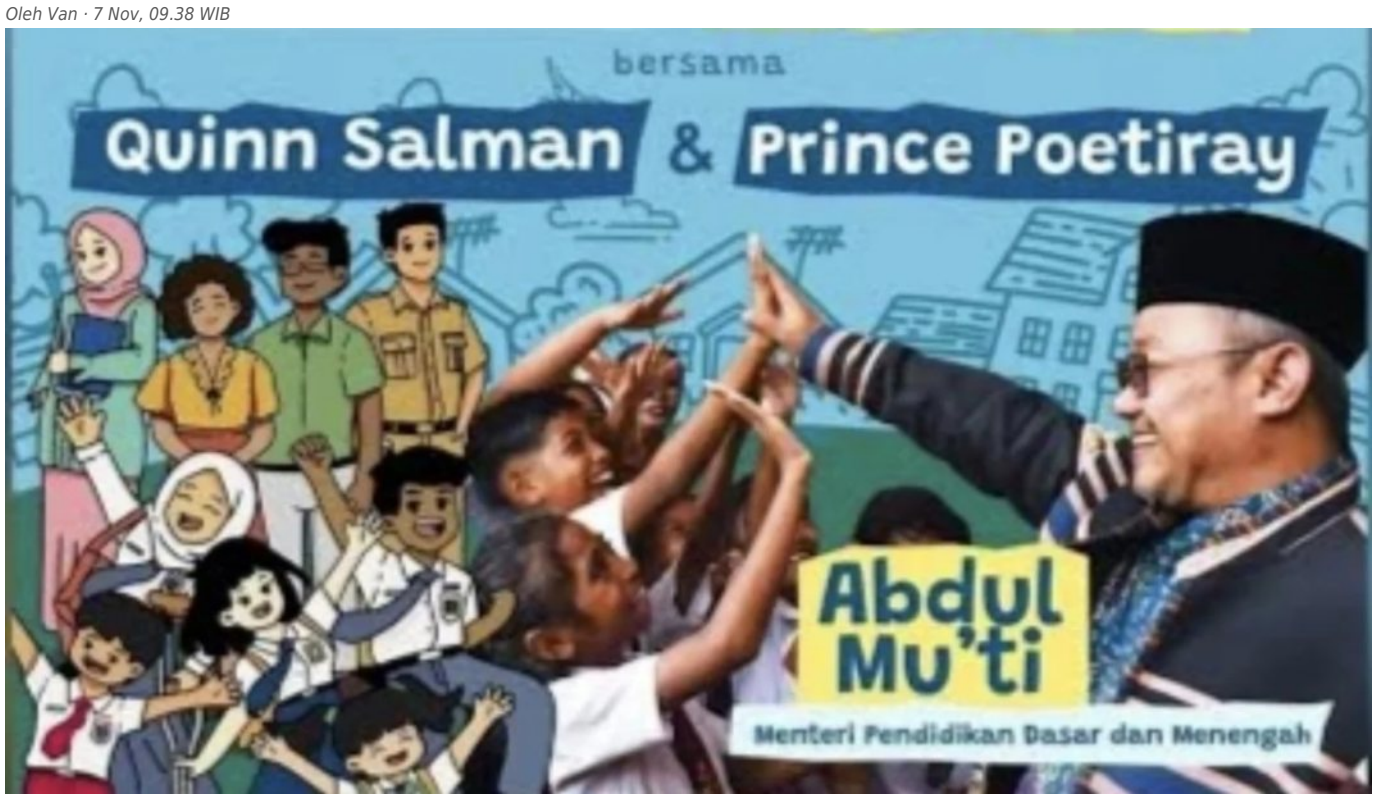
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Rukun Sama Teman Sabet Dua Piala AMI Awards 2026, Penciptanya Ternyata Menteri Abdul Mu'ti

Oleh Van · 7 Nov, 09.38 WIB



Ayo dengarkan lagu 'Rukun Sama Teman' untuk mempererat persahabatan! Lagu ini dipersembahkan untuk mendukung generasi cerdas berkarakter.

JAKARTA — Siapa sangka, salah satu lagu anak yang berhasil membawa pulang dua penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026 ternyata diciptakan oleh seorang menteri.

Lagu tersebut berjudul Rukun Sama Teman, karya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, yang dibawakan penyanyi muda Quinn Salman dan Prince Poetiray dengan penataan musik oleh Dwiki Darmawan.

Kolaborasi lintas generasi itu berhasil menyabet dua penghargaan dalam malam puncak AMI Awards ke-29 yang digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta, 4 November lalu.

Dua penghargaan tersebut masing-masing diraih Quinn Salman dan Prince Poetiray untuk kategori Duo/Grup/Kolaborasi Anak-anak Terbaik, serta Dwiki Darmawan untuk kategori Penata Musik Lagu Anak-anak Terbaik.

Lantas, apa yang membuat lagu Rukun Sama Teman menarik hingga berhasil meraih dua penghargaan musik nasional?

Dikutip dari Keterangan Kemendikdasmen, Sabtu 7 November 2026, Rukun Sama Teman mengangkat persoalan yang dekat dengan kehidupan pelajar, yakni persahabatan, toleransi, dan pencegahan perundungan atau bullying di sekolah.

Melalui liriknya, Abdul Mu'ti ingin menyampaikan pesan sederhana agar anak-anak saling menghormati, menyayangi, dan tidak melakukan tindakan yang menyakiti teman.

Pesan tersebut kemudian dikemas dalam sebuah karya musik yang mempertemukan talenta penyanyi anak dengan pengalaman musisi senior.

Quinn Salman dan Prince Poetiray dipercaya menjadi penyanyi yang membawakan Rukun Sama Teman.

Sementara itu, Dwiki Darmawan, musisi yang dikenal melalui kiprahnya sebagai pemain keyboard, komposer, dan penata musik, mendapat kepercayaan menggarap aransemen lagu tersebut.

Saat menerima penghargaan AMI Awards 2026, Dwiki mengungkapkan bahwa lagu ini lahir dari kepedulian Abdul Mu'ti terhadap anak-anak Indonesia.

"Rukun Sama Teman dibuat agar kita rukun dengan teman, tidak ada perundungan di sekolah," ujar Dwiki, dalam keterangan itu.

Dwiki juga menyampaikan apresiasi kepada Abdul Mu'ti serta Quinn Salman dan Prince Poetiray yang terlibat dalam proses kreatif lagu tersebut.

Quinn Salman mengaku senang dapat memperoleh penghargaan bersama Prince Poetiray. Ia berharap lagu yang mereka bawakan bisa mengajak anak-anak Indonesia membangun hubungan pertemanan yang lebih baik.

Menariknya, Rukun Sama Teman sebenarnya masuk dalam tiga nominasi bidang musik anak-anak, tetapi berhasil memenangkan dua kategori.

Kategori Pencipta Lagu Anak-anak Terbaik tidak dimenangkan Abdul Mu'ti, melainkan tim pencipta lagu Sikilku Iso Muni dari film Na Willa.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Upaya Makar Geng Solo

Oleh Redaksi · 7 Nov, 08.21 WIB



Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.(())

ENYADAP Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, mustahil bukan untuk tujuan makar. Hal itu, sudah penulis tegaskan saat diskusi di program Interupsi (Inews TV, 5 November 2026).

Kalau yang disadap tukang bakso, tukang cilok, tukang mie ayam. Boleh lah, pasal pidananya tak dikaitkan dengan makar. Karena tak mungkin ada motif kekuasaan, dalam kasus ini.

Akan tetapi, penyadapan ini sudah jelas. Ada Presiden dan sejumlah pejabat negara, ada pimpinan partai Politik, ada tokoh media, aktivis, pengusaha. Bahkan, informasi terakhir total jumlah yang disadap 6.000 orang.

Karena itu, terlalu naif jika kasus ini hanya berpatokan pada ketentuan Pasal 258 KUHP (penyadapan ilegal), Pasal 332 KUHP (akses ilegal), dan Pasal 32 UU ITE (editing ilegal). Karena semua itu baru bicara aktivitas dan tujuan, belum masuk pada motif. Padahal, hukum pidana selain mengungkap tujuan juga wajib merembet ke motif.

Motif, tak selalu harus berdasarkan keterangan tersangka. Tersangka, pasti bohong. Kecuali, ada keinsyafan untuk taubat dan mencintai negara dan ingin menebus dosa dengan memberikan informasi yang jujur untuk menyelamatkan negara setelah sebelumnya mereka rusak.

Motif, juga dapat dibaca dari hukum kausalitas. Dan dalam teori pidana, kausalitas ini adalah hukum sebab akibat yang menerangkan mengapa kejahatan bisa terjadi atau dilakukan. Apa penyebab penyadapan? Apa akibat dari penyadapan?

Sebab penyadapan, sudah jelas mengarah ke motif kekuasaan. Akibat penyadapan, jelas membahayakan nyawa Presiden, menghilangkan kemerdekaan Presiden bahkan secara substansi melumpuhkan Presiden hingga tak dapat menjalankan kekuasaan secara efektif karena seluruh informasi telah diketahui dan dikendalikan pihak lain.

Memang benar, secara gramatikal ketentuan Pasal 191 KUHP zahirnya mengarah pada tujuan membahayakan nyawa (membunuh) presiden, menghilangkan kemerdekaan Presiden dan membuat Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan.

Akan tetapi secara substantif, penyadapan ini jelas membahayakan keselamatan Presiden, menghilangkan kemerdekaan (yang berkaitan dengan informasi dan strategi) dari Presiden dan pada titik tertentu telah melumpuhkan kekuasaan Presiden karena ada kendali lain di luar kekuasaan Presiden yang mempengaruhi (intervensi) kekuasaan Presiden.

Kepala BIN Jenderal TNI (Hor) (Purn) Muhammad Herindra dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menyatakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo dan gengnya, mengarah pada tindakan makar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Klarifikasi dan Permintaan Maaf Herri Prass Usai Didatangi Atlet MMA Yudi Cahyadi

Oleh Redaksi · 7 Nov, 08.31 WIB



BANDA ACEH - Permintaan maaf tersebut disampaikan setelah kediamannya di Kabupaten Bogor didatangi petarung MMA Yudi Cahyadi bersama sejumlah orang.

Melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Herri mengakui bahwa selama ini dirinya keliru dalam menyampaikan kritik maupun bantahan terhadap sejumlah tokoh agama.

Ia menilai gaya komunikasinya yang terlalu keras dan berapi-api membuat pesan yang ingin disampaikan justru tidak tersampaikan dengan baik.

Herri mengakui kritik seharusnya disampaikan secara tenang dan bijak, bukan dengan nada tinggi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Ia pun meminta maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

"Pertama-tama di video ini saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada Prof. Adi Hidayat, terhadap UAS, dan terhadap seluruh elemen masyarakat atas kegaduhan yang terjadi ini," ujar Herri, dikutip Kamis (5/11/2026).

Rumah Herri Pras Didatangi Petarung MMA

Permintaan maaf tersebut muncul setelah polemik konten Herri menjadi perhatian publik. Sebelumnya, petarung MMA Yudi Cahyadi mendatangi rumah Herri di Kabupaten Bogor bersama sejumlah orang.

Yudi mengaku kedatangannya dipicu oleh konten Herri yang dinilai telah mencela dan menghina sejumlah ulama. Selain UAH dan UAS, nama Tuan Guru Bajang serta Habib Umar bin Hafiz juga disebut dalam polemik tersebut.

Yudi bahkan mengaku ingin menyelesaikan persoalan melalui duel satu lawan satu dengan konsep tanpa aturan atau no rules.

Ia menyebut Herri pernah melontarkan tantangan serupa, tetapi dinilai tidak bersedia ketika diajak bertarung secara langsung.

Dalam video klarifikasinya, Yudi juga mengungkit persoalan yang disebut pernah terjadi pada 2024.

Ia menuding Herri sebelumnya telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya, tetapi kembali membuat kritik dengan bahasa yang dianggap menghina ulama.

Herri Minta Polisi Profesional Tangani Laporan

Di tengah polemik tersebut, Herri turut meminta kepolisian menangani laporan dugaan tindak pidana yang dialaminya secara profesional, objektif, dan independen.

Ia berharap proses penyelidikan tidak terpengaruh tekanan demonstrasi maupun intervensi pihak luar.

Menurutnya, upaya membangun opini publik tidak boleh sampai mengaburkan fakta dan menghambat pengungkapan perkara.

Herri menegaskan bahwa dirinya hanya menginginkan keadilan serta kepastian hukum. Ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses penyelidikan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku

REDAKSI

PENERBIT: PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI: Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA: Adam
REDAKTUR: Hayat
SEKRETARIS REDAKSI: Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin